e-news letter
NOV i 2019
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI I
WhatsApp Diretas, PKS Ingatkan Urgensi Kedaulatan Digital

KOMISI IV
Program Jangka Pendek Kementan Tidak Mendukung Penuh UU Pangan

KOMISI VII
RUU Terkait Lingkungan Harus Jadi Prioritas

KOMISI X
Aplikasi Sistem Pendidikan Perlu Pertimbangan Sangat Cermat

PROFIL
Pendidikan Keluarga Nomer Satu

KOMITMEN KAMI TETAP

Rakyat Jangan Jadi Korban Defisit BPJS

RAKYAT JANGAN JADI KORBAN DEFISIT BPJS

ALIFUDIN
Anggota Komisi IX

masalah BPJS harus terus kita kawal, karena masih banyak masyarakat yang menolak kenaikan iurannya, pemerintah harus memiliki kepedulian dan keberpihakan yang lebih dalam pelayanan kesehatan,

K. MUFIDAYATI
Anggota Komisi IX

Kita sudah sampaikan tidak setuju kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III, karena memberatkan masyarakat. Rakyat jangan jadi korban defisit BPJS

ANSORY SIREGAR
Wakil Ketua Komisi IX

Untuk peserta mandiri Kelas 3, Fraksi PKS menolak berapapun kenaikan iuran BPJS. Bahkan kita usul untuk digratiskan. karena untuk iuran yang Rp 25 ribu saja banyak yang tidak mampu bayar.

ANIS BYARWATI
Anggota Komisi XI

Keputusan menalkkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB.

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PKS
Ayo Lebih Baik

DPR - RI

MEMPERINGATI MAULID NABI
MUHAMMAD
صلى الله عليه وسلم
12 RABIUL AWWAL 1441 H

Terus Berkhidmat Untuk Kebaikan Umat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Website fraksipks.id
Instagram fraksipksdprri
Twitter @fraksipksdprri
Facebook Fraksi PKS DPR RI
Telegram @PKSart

WhatsApp Diretas, PKS Ingatkan Urgensi Kedaulatan Digital

Kasus-kasus ini semakin menguatkan kebutuhan kita akan sebuah payung hukum yang menjamin Digital Sovereignty (kedaulatan digital), khususnya perlindungan data pribadi sebagai pengejawantahan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G bahwa perlindungan diri adalah hak warga negara

Dr. H. SUKAMTA
Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (6/11) — Perusahaan siber Israel, NSO Group, diduga telah meretas sekitar 1.400 pengguna WhatsApp di sekitar 20 negara. Dalam melakukan aksi ini, NSO menggunakan software andalannya Pegasus.

Pihak WhatsApp pun diketahui telah mengajukan gugatan kepada NSO Group Technologies. Dikabarkan juga Pegasus menyerang aplikasi lain seperti Skype dan Telegram.

Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan Kemenkominfo perlu memastikan bagaimana tingkat keamanan pengguna Whatsapp, Skype dan Instagram di Indonesia.

"Perlu kita pastikan apakah ada pengguna di Indonesia yang menjadi korban. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Kasus-kasus ini semakin menguatkan kebutuhan kita akan sebuah payung hukum yang menjamin Digital Sovereignty (kedaulatan digital), khususnya perlindungan data pribadi sebagai pengejawantahan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G bahwa perlindungan diri adalah hak warga negara," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa kita semua harus memiliki awareness terhadap keamanan data kita. Solusi teknis jangka pendek yang mudah bisa dilakukan dengan mengupdate aplikasi yang kita pakai, seperti arahan Badan Siber dan Sandi Negara. Tapi ini tidak cukup, karena internet sangat rentan dengan kejahatan seperti kasus peretasan dan ke depannya diprediksi kasus-kasus kejahatan serupa akan terus berulang, kita harus memikirkan dan menyiapkan perlindungan data demi mewujudkan kedaulatan digital tadi.

"Karena itu kita dorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masuk Prolegnas 2019-2024. Ini juga sudah menjadi komitmen bersama antara Kemenkominfo dan Komisi I saat Raker tadi siang, bahwa RUU PDP salah satu RUU yang akan kita prioritaskan. Saya berharap nantinya RUU PDP ini harus bisa menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan data pribadi dan terwujudnya kedaulatan digital di Indonesia," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

H. Sukamta, Ph.D Anggota Komisi I DPR RI (Foto : dpr.go.id)

DPR Minta LSF Dorong Budaya Sensor Mandiri

Jakarta (5/11) –– Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Thoriq Hidayat mengapresiasi Laporan Kinerja Lembaga Sensor Film Periode 2015-2019, mengenai pelaksanaan pelayanan penyensoran dan pelaksanaan sosialisasi budaya sensor mandiri.

"Bahwa fakta di lapangan, film menjadi sesuatu yang sangat vital baik positif maupun negatif," kata Thoriq.

Legislator dari Daerah Pemilihan Tasikmalaya dan Garut ini menambahkan, banyak kajian dari pakar budaya yang menyatakan bahwa film bisa mengajak orang untuk dekat dengan sajadah maupun menjadi haram jadah.

"Lembaga Sensor Film menjadi lembaga yang sangat penting dalam melakukan sensor sehingga dapat memberikan tontonan yang sehat bagi semua usia." tegas Thoriq.

Legislator dari PKS ini menambahkan, film yang beredar di TV lebih banyak dari pada film layar lebar. Hal ini menjadi tantangan bagi para produser film untuk memproduksi film yang berkualitas dan diminati oleh semua orang.

"Batas kewenangan antara LSF dan KPI perlu diperjelas, jangan sampai film terlalu bebas beredar dan tidak ada sensor sehingga menimbulkan kerusakan moral yang luar biasa", lanjutnya.

Pada pasal 80, UU 33 tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan adanya sanksi bagi orang yang sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 10 M. "Aturan ini harus ditaati oleh semua orang", tutup Thoriq.

Film yang beredar di TV lebih banyak dari pada film layar lebar. Hal ini menjadi tantangan bagi para produser film untuk memproduksi film yang berkualitas dan diminati oleh semua orang

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

image istimewa

Antisipasi Tergerusnya Budaya di Perbatasan

Perkuat Budaya Lokal

Lunturnya budaya lokal masyarakat perbatasan ini, dapat melunturkan rasa nasionalisme, apalagi daerah perbatasan adalah pintu gerbang NKRI dan akan berhubungan dengan keamanan

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, MA
Anggota Komisi II DPR RI

Foto : dpr.go.id

Jakarta (7/11) –– Anggota komis II DPR RI Surahman Hidayat dalam Rapat Kerja Kemendagri bersama Komisi II DPR RI menyoroti perlunya perhatian yang serius dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementrian Dalam Negeri terhadap mulai lunturnya budaya kebangsaan dan budaya lokal daerah-daerah perbatasan.

"Perlu diketahui dan menjadi konsen dari BNPP budaya masyarakat perbatasan sudah semakin tergerus terpengaruh budaya negara tetangga". kata surahman

Surahman menambahkan lunturnya budaya lokal masyarakat perbatasan ini, dapat melunturkan rasa nasionalisme, apalagi daerah perbatasan adalah pintu gerbang NKRI dan akan berhubungan dengan keamanan.

"Selain dari pada itu masalah lain ialah tidak sedikit daerah-daerah perbatasan yang tidak memakai Rupiah sebagai mata uang untuk jual beli," ungkap politisi PKS Dapil Jawa Barat 10.

Menurut Surahman kondisi ini terjadi diperbatasan Indonesia-Malaysia-, maupun Indonesia-timor leste.

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah diposisikan sebagai satu di antara simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) serta merujukj pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka satu di antara menjaga kedaulatan rupiah adalah menggunakan rupiah dalam transaksi keuangan di wilayah NKRI.

"Oleh karena itu persoalan ini perlu jadi perhatian serius dari kemendagri, dengan membuat program-program untuk menguatkan budaya lokal masyarkat perbatasan maupun membuat program-program lintas kementrian/lembaga seperti dengan kementrian keuangan maupun Bank Indonesia supaya masyarakat tetap memakai mata uang rupiah untuk transaksi jual beli sehari-hari," imbuhnya.

Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

Komisi III tekankan lima point Renstra Kejagung

DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H. - Anggota Komisi III DPR RI

Pandeglang (ANTARA) - Anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal Kabupaten Lebak-Pandeglang, Dr. H.A.Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSi menekankan 5 point terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ya dari rapat kerja komisi III dengan Jaksa Agung, kita menekankan lima point yang kemungkinan besar menjadi renstra Kejaksaan Agung." tandas Dimyati Natakusumah saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam menanggapi rapat kerja perdana itu, Jumat (12/11)

Menurut mantan Bupati Pandeglang dua periode ini, lima point yang ditekankan terhadap beberapa hal yang kemungkinan besar menjadi Renstra Jaksa Agung (Kejaksaan), yaitu Perubahan paradigma penanganan perkara, Perbaikan sistem pemberantasan korupsi, Peningkatan profesionalitas SDM, Penyelamatan aset, Pemanfaatan sarana informasi dan teknologi.

"Lima point itu saya tekankan pada Kejaksaan Agung RI dalam Renstranya," kata kader PKS dari Dapil I Banten ini.

> Penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidanakan perilaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang lagi
>
> **Dr. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H**
> Anggota Komisi III DPR RI

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rapat kerja perdana dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat perdana tersebut Burhanuddin memaparkan 8 fokus dirinya sebagai Jaksa Agung.

"Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidanakan perilaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang lagi," kata Burhanuddin mengawali pemaparannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta beberapa waktu lalu.

Di hadapan Ketua Komisi III Herman Hery, Burhanuddin mengatakan menginstruksikan para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengawasi peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi. Dia pun menyinggung aset yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Kedua, terhadap beberapa perda yang menghambat perizinan investasi maka saya telah menginstruksikan kepada para Kajati untuk memonitor keberadaan perda-perda tersebut," ujar Burhanuddin.

Industrialisasi Garam Nasional Harus Selesai dalam Periode ini

> "Saya berharap, bapak menteri mampu mengatasi persoalan garam nasional yang tidak mampu diselesaikan oleh menteri sebelumnya. Ini sangat penting sebagai catatan, agar ada satu saja kebanggan bangsa kita akan munculnya prestasi di bidang maritim"
>
> **drh. H. SLAMET**
> Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (06/11) --- Anggota komisi IV DPR Slamet menyampaikan perlunya memperhatikan soal garam nasional kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada rapat kerja DPR dan pemerintah.

Meski pemerintah menyatakan terpaksa melakukan impor garam, namun legislator dari Sukabumi ini mengingatkan bahwa mengurangi import garam merupakan amanah undang-undang no.7 tahun 2016.

Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah, bahwa pada Oktober 2019, telah masuk sebanyak 2,216 juta ton garam impor sudah masuk Indonesia. Jumlah ini setara dengan 80% lebih dari alokasi impor garam tahun ini yang sebesar 2,75 juta ton.

"Pemerintah harus mencari solusi yang tepat untuk memajukan sektor pergaraman nasional. Ini kesempatan menteri yang sebelumnya sebagai pimpinan komisi IV, untuk mampu menemukan dan mengurai masalah importasi garam. Minimal mengurangi impor garam sesuai amanah UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam", ujar Slamet.

Slamet mengatakan, bahwa pemerintah saat ini masih berhadapan pada dilema produksi garam industri yang masih minim. Desakan impor garam terutama garam industri sangat deras karena memang kemampuan negara kita dalam menghasilkan garam industri sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Sehingga, kini sudah banyak industri pengguna garam yang sulit beroperasi, utamanya industri aneka pangan pemain besar. Bahkan, salah satu perusahaan kimia sudah merumahkan sementara 180 karyawannya gara-gara produksinya terhenti.

Tantangan pemerintah saat ini menurut ketua kelompok komisi IV PKS ini adalah, bagaimana caranya pemerintah mampu menghasilkan garam untuk keperluan industri yang saat ini sebesar 2,75 juta ton. Industrialisasi garam kita sangat minim, padahal panjang laut kita lebih dari cukup, dan yang paling penting, cahaya matahari sangat berlebih. Namun, lanjut dia, hasil lokal pruduksi garam kita baru mampu berkualitas konsumsi rumah tangga.

"Saya berharap, bapak menteri mampu mengatasi persoalan garam nasional yang tidak mampu diselesaikan oleh menteri sebelumnya. Ini sangat penting sebagai catatan, agar ada satu saja kebanggan bangsa kita akan munculnya prestasi di bidang maritim", pungkas Slamet.

Foto :
Ardian (Humas Fraksi PKS DPR)

PKS Sayangkan Target Perikanan Tangkap Terhambat Masalah Birokrasi

"Pemerintah bila ingin mencapai target perikanan tangkap mesti melakukan dua hal, yakni permudah birokrasi dan sekaligus, dukung program pembinaan nelayan dengan skala 30GT ke atas

Drs. HAMID NOOR YASIN, MM
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (7/11) –– Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV Hamid Noor Yasin mengatakan, KKP perlu memperbaiki sistem birokrasinya, bila ingin mencapai target perikanan tangkap sebesar 8,02 juta ton per tahun.

Pasalnya menurut Hamid, beberapa tahun ke belakang, banyak permasalahan perijinan yang mandek tertunda hingga satu tahun lebih tidak selesai. Ini akan sangat mengganggu kinerja pelaku penangkapan ikan, terutama penangkapan ikan pada skala besar.

"Pemerintah bila ingin mencapai target perikanan tangkap mesti melakukan dua hal, yakni permudah birokrasi dan sekaligus, dukung program pembinaan nelayan dengan skala 30GT ke atas," ujar Hamid.

Politisi PKS ini mengatakan, SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) yang tertunda hingga masing-masing 400 izin lebih, sudah berumur penungguan selama satu tahun merupakan bukti adanya birokrasi yang mandek.

"Perlu adanya sebuah upaya penyederhanaan birokrasi yang tertuang pada Pepres no 3 tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional agar lebih mempermudah masalah izin ini", tuturnya.

Padahal, lanjut Hamid, perpres percepatan pembangunan industri perikanan nasional ini mengamanatkan mengenai kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal industrialisasi sektor perikanan.

"Mestinya tujuan perpres ini mampu mewujudkan kemajuan sektor perikanan terutama tangkap yang potensinya sangat besar. Namun pada kenyataanya, pada periode 2014-2019 terjadi peningkatan produksi perikanan secara umum, namun daya saing global sektor perikanan masih kalah dari Negara lain misalnya Vietnam", imbuhnya.

Drs. HAMID NOOR YASIN, MM Anggots Komisi IV DPR RI

Lebih lanjut Hamid mengatakan Nilai ekspor Vietnam yang negara kecil itu peringkat 3 dunia, sedangkan kita negara besar dengan bentangan laut yang sangat panjang hanya pada urutan ke tiga belas nilai ekspor perikanannya.

"Saya Menduga, penyebab lambannya proses industrialisasi perikanan kemungkinan dikarenakan Periode lalu, KKP masih berkutat pada persoalan dasar seperti IUU Fishing dan juga Perikanan skala kecil. Mestinya anggaran kapal untuk industri perikanan tangkap itu 30GT ke atas, bukan 5 GT yang hanya mampu menjangkau 4 mil laut. Ini tidak sinkron", ucap Hamid.

Perpres No.3/2017, terang Hamid, telah mengamanatkan sebanyak 5 program dan 28 kegiatan yang harus segera ditindak lanjuti secara strategis oleh berbagai kementerian. Beberapa amanat Perpres tersebut yang saat ini pelaksanaannya sangat lamban, yakni pembangunan 4.787 kapal ikan berukuran di bawah 30 gros ton (GT) oleh Pemerintah dan 12.536 kapal ikan diatas 30 GT oleh swasta. sebagai contoh pemerintah (KKP) sampai pada agustus 2019 baru merealisasikan 2200-an kapal perikanan berbagai ukuran. Atau hanya setengah dari target output sebesar 4787 diakhir 2019.

"Saya harap, ada hal-hal yang bisa diselesaikan untuk mencapai target perikanan tangkap oleh KKP, dengan tangan pak menteri periode ini bisa dilakukan. Yang paling utama adalah penyederhanaan birokrasi dan regulasi serta eksekusi yang tidak menyalahi prosedur. Bila semua berjalan sesuai rencana, kita semua berharap kemajuan industri perikanan dapat terwujud dengan cepat", pungkas Hamid Noor Yasin.

PKS Prihatin Karhutla Tahun Ini 3 Kali Lebih Besar Dibanding Tahun Lalu

Tegakkan keadilan. Jangan sampai, bila pelaku karhutla adalah rakyat kecil, hukum diproses dengan cepat. Sementara bila pelakunya adalah korporasi proses hukum berjalan sangat lambat

Dr. HERMANTO, SE., MM
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS

Foto : dpr.go.id

Jakarta (07/11) –– Anggota Komisi 4 DPR Hermanto mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tahun ini 3 kali lebih besar dibandingkan karhutla tahun 2018. Di tahun ini terdapat 600 hot spot dan 59 ring fire.

"Cakupan luas lahan karhutla sampai November ini kurang lebih 361.857 ha. Walaupun ring fire sudah mulai berkurang, akan tetapi di beberapa tempat masih terdapat potensi kebakaran terutama di lahan gambut," papar Hermanto dalam keterangan tertulis usai mengikuti kunjungan spesifik (kunspek) karhutla Komisi 4 DPR di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (7/11).

Hermanto mendesak Pemerintah agar lebih serius dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif mengingat pola waktu dan segmen hutan yang terbakar serta pelaku sudah dapat diidentifikasi sejak dini.

"Karhutla, 99 persen disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Presiden agar melakukan evaluasi konkrit terhadap kebijakan, peraturan dan menteri terkait. Mengapa karhutla selalu berulang terjadi setiap tahun padahal faktor penyebab sudah diketahui," papar legislator dari FPKS ini.

Terhadap pelaku karhutla, lanjutnya, Hermanto meminta agar dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi administrasi dan penegakan hukum yang lebih berat.

"Tegakkan keadilan. Jangan sampai, bila pelaku karhutla adalah rakyat kecil, hukum diproses dengan cepat. Sementara bila pelakunya adalah korporasi proses hukum berjalan sangat lambat," tandasnya.

Lebih jauh, Hermanto meminta pemerintah agar menambah peralatan pemadam kebakaran, meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku pemadaman dan memperkuat koordinasi instansi pemadam kebakaran.

"Untuk itu semua perlu ada penambahan anggaran untuk pemadaman karhutla," pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini.

Pemerintah Harus Perjelas Aturan Jam Kerja, Bagi Peneliti yang Tugas Belajar

"Saya berharap, pemerintah memberi ruang waktu yang lebih mudah bagi peneliti, untuk membekali ilmunya hingga sampai S2. Ini program bagus, tapi mesti diimbangi dengan kemudahan dalam mencapainya

H. JOHAN ROSIHAN, ST
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (4/11) --- Anggota DPR RI Komisi IV Johan Rosihan banyak mendapat keluhan dari beberapa peneliti di lingkungan pemerintah, akibat dampak peraturan terbaru tentang peneliti, yang mengharuskan di tahun 2026 semua peneliti berstatus S2, karena jika tidak S2, maka jabatan dan fungsi penelitiannya akan dicabut.

Johan mengatakan, bahwa saat ini pengurusan izin belajar di kementerian sudah relatif jauh lebih mudah dibanding dahulu. Di masa lalu, pegawai negeri bila akan mengajukan izin belajar bisa sampai lulus baru dapat izin belajar, yang mengakibatkan ijazahnya tidak diakui. Paling cepat 6 bulan izin baru keluar. Saat ini, hanya kurang dua bulan, izin belajar sudah bisa keluar. Mungkin ini dampak dari tuntutan pemerintah untuk menjadikan SDM penelitinya berstatus S2.

Legislator PKS ini menjelaskan, bahwa Berdasar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 10/Permentan/0T. 40/3/2015, pada Bab III tentang izin belajar menyebutkan, Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari. Para peneliti dihadapkan pada penyelanggara pendidikan atau Kampus yang mengadakan jam belajar di jam kantor. Pilihan ini akan ditemui karena tidak semua kampus mengadakan jam belajar di malam hari.

"Saat ini, para peneliti harus mengambil jurusan yang linear dengan bidang keahliannya. Kalau tidak, ijazahnya akan dinilai rendah. Ini yang akan menjadikan kerugian para peneliti bila ijazahnya tidak linear meskipun mereka telah mengeluarkan sejumlah uang yang besar, waktu, tenaga dan pikiran, dengan biya sendiri, karena tidak semua peneliti dapat beasiswa dari pemerintah", jelas Johan.

Legislator asal Sumbawa ini memberi gambaran, bahwa sebenarnya ada peluang melalui PerMenpan/RB, yang mengatur tentang izin belajar dimana salah satu pasalnya adalah pegawai diperbolehkan keluar dengan izin atasan. Ada banyak peraturan pemerintah yang saling berbeda, sehingga sangat diperlukan payung hukum, sebagai panduan agar tidak saling bertentangan. Surat Edaran Menpan No.4 tahun 2003 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar sudah bagus sebagai standard.

"Saya berharap, pemerintah memberi ruang waktu yang lebih mudah bagi peneliti, untuk membekali ilmunya hingga sampai S2. Ini program bagus, tapi mesti diimbangi dengan kemudahan dalam mencapainya. Pembangunan SDM akan baik dilaksanakan, agar negara kita semakin siap menghadapi persaingan global yang dimulai dari kualitas SDM kita", tutup Johan Rosihan.

Anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan, ST

Pupuk subsidi, Perlu Aturan Pemerintah

Sensus tani sangat mendesak untuk memetakan petani-petani potensial yang mampu membantu negara untuk memakmurkan masyarakat. Masih banyak ketidakadilan bagi penerima pupuk bersubsidi akibat kekangan peraturan pemerintah yang hanya diperuntukkan pada kelompok"

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP. MM
Anggota Komisi IV DPR RI

Foto Gilang

Jakarta (04/11) — Pupuk bersubsidi hanya untuk segolongan petani saja yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) menjadi perhatian anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin. Distribusi pupuk hanya pada institusi kelompok petani ini, merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, sehingga ada pekerjaan pemerintah lagi untuk bersosialisasi agar semua petani di Indonesia semua berkelompok.

"Yang berkelompok ini kan tidak banyak dibandingkan seluruh petani di Indonesia. Dan yang mendapat alokasi pupuk subsidi hanya kelompok-kelompok yang memiliki akses dengan kekuasaan. Padahal total APBN pupuk subsidi hampir menyamai anggaran Kementerian Pertanian di APBN satu tahun", ucap Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan pada nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Sedangkan untuk penerima dan harga diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Semua harus mengacu pada ketepatan yang prinsip yakni Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu.

Legislator Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa tahun 2018, pada audit BPK yang dilakukan tahun 2019, 30 persen penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat. Kemungkinan inilah, lanjut dia, RAPBN pupuk bersubsidi tahun 2020 pada angka 26 triliun yang tahun sebelumnya 36 triliun, turun 10 Triliun dari APBN 2019.

Pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta dengan Nota Keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2019. Salah satu kebijakan yang penting untuk sektor pertanian dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020 adalah Pemerintah menurunkan subsidi pupuk tahun 2020. Pemerintah beralasan subsidi benih tidak efektif dan tidak efisien. Subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp 10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan APBN tahun 2019 sebesar Rp 37.101,6 miliar.

Pemberian pupuk bersubsidi, lanjut Akmal, akan membantu mendongkrak produktivitas pertanian. Namun pada kenyataanya, banyak distributor nakal yang merusak sistem di tambah lagi banyak juga penjual nakal yang menjual pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Sebagai contoh tahun 2017 terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, padahal penghitungan produksi, distribusi dan estimasi calon penerima sudah dihitung secara cermat.

Akmal mengatakan, bahwa pemerintah mesti membuat rencana peningkatan tehnik distribusi pupuk bersubsidi, agar substansi adanya program ini tercapai yakni swasembada pangan. Pemerintah perlu mendorong seluruh petani berkelompok atau memperluas dengan sensus tani yang mencatat seluruh petani yang layak mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Saya kira pemerintah perlu mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pengelolaan pupuk bersubsidi ini terutama masalah distribusi calon penerima. Sensus tani sangat mendesak untuk memetakan petani-petani potensial yang mampu membantu negara untuk memakmurkan masyarakat. Masih banyak ketidak adilan bagi penerima pupuk bersubsidi akibat kekangan peraturan pemerintah yang hanya diperuntukkan pada kelompok", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan bagi penyelesaian kompensasi ini menyebabkan lambatnya pemberian kompensasi tersebut

Maskapai Diminta Tuntaskan Kompensasi Korban Jatuhnya Pesawat

H. SURYADI JAYA PURNAMA, ST
Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (4/11) --- Satu tahun lebih pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang yang menewaskan 189 penumpang pada 29/10/2018, menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi J.P.

Menurut Suryadi terkait dengan kecelakaan Lion Air JT 610, KNKT telah menerbitkan laporan yang menghasilkan sejumlah rekomendasi. Namun di sisi lain ada sejumlah kewajiban yang seharusnya bisa diselesaikan lebih dahulu yakni masalah kompensasi pihak Lion Air terhadap para ahli waris korban.

"Peraturan undang-undang yang berlaku telah mengatur tentang besaran kompensasi sebagaimana yang disampaikan Permen No. 77 tahun 2011 pasal 2", ungkap Suryadi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap : (a) Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka (b) Hilang atau rusaknya bagasi kabin, (c) Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat, (d) Hilang, musnah, atau rusaknya kargo, (e). Keterlambatan angkutan udara; dan (f) Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut Suryadi menambahkan dalam Permen No. 77 tahun 2011, pasal 3 huruf a menyatakan penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1,25 M per penumpang.

"Terkait aturan tersebut pihak Lion Air telah menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.3 M dan hingga kini telah diberikan kepada 75 keluarga ahli waris dari total dari 189 korban tewas pesawat tersebut", imbuhnya.

Sedangkan pihak Boeing, kata Suryadi, juga memberikan ganti rugi yang bersifat sukarela, yaitu sekitar Rp.1.6 M dan sampai saat ini baru 25 keluarga yang menerima kompensasi tersebut, sementara 40 keluarga lainnya dalam proses pembayaran.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, ST SE Anggota Komisi V DPR RI

Suryadi menambahkan belum selesainya kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak Lion Air kepada pihak keluarga, disebabkan adanya beberapa keluarga ahli waris yang menolak untuk menandatangani dokumen *Release and Discharge*.

"Dokumen tersebut mewajibkan keluarga ahli waris melepaskan hak menuntut kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur mengenai kewajiban ahli waris mengenai hal ini", pungkasnya.

Sebaliknya Suryadi menegaskan bahwa Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011, pasal 23 menyatakan besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Artinya para ahli waris diberi kebebasan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk menuntut ke pengadilan apabila ganti rugi tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan, " tuturnya.

Selain masalah tersebut, Suryadi pun menerangkan belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan bagi penyelesaian kompensasi ini menyebabkan lambatnya pemberian kompensasi tersebut.

Atas kondisi tersebut Anggota Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara, untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air, untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

"Yang Kedua saya mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk merevisi Permen No. 77 tahun 2011 agar memberikan batas waktu dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan", ujar Suryadi.

Selanjutnya Suryadi mendesak Pemerintah untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX sampai semua rekomendasi dari KNKT.

"Keempat saya meminta maskapai Lion Air agar aktif melayani keluarga ahli waris dengan cara membantu mendaftarkannya kepada Boeing agar segera mendapatkan juga kompensasi dari Boeing", tutup Suryadi.

"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat 3 bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Komisi V DPR RI

SANTUNAN KORBAN LION AIR JT 610 BELUM TUNTAS

DPR Desak Pemerintah Revisi Permenhub Nomor 77 Tahun 2011

Jakarta (5/11) -- Para Ahli Waris Korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Karawang, Jawa Barat belum semua mendapat santunan, direspon Anggota DPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhu.

Syaikhu meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011.

Seperti diketahui, tragedi yang menewaskan 189 penumpang termasuk awak pesawat itu terjadi pada 29 Oktober 2018 lalu. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menerbitkan laporan dengan sejumlah rekomendasi. Namun, di sisi lain, masalah kompensasi pihak Lion Air terhadap Para Ahli Waris korban belum juga diberikan.

Salah satu penyebabnya diduga karena Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang yang tak memberikan batas waktu kepada pihak pengangkut.

"Ada celah dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 karena tidak adanya tenggat waktu atau batas akhir kepada pihak maskapai untuk memberikan santunan kepada Ahli Waris," ujar Syaikhu yang diamanahkan PKS di Komisi V.

Untuk itu, Syaikhu mendesak pemerintah untuk merevisi Permenhub tersebut. Dia mengusulkan klausul untuk memberikan batas waktu 3 bulan dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara.

"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat 3 bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang," tegas Cawagub DKI Jakarta itu.

Revisi ini perlu, menurut Syaikhu, karena isi Permenhub sudah cukup bagus. Dalam Pasal 2 disebutkan Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian penumpang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka. Sementara Pasal 3 Huruf a menyatakan: Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada

hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1,25 M per penumpang.

Pihak Lion Air telah menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp.1,3 M dan hingga kini telah diberikan kepada 75 keluarga ahli waris dari total dari 189 korban tewas pesawat tersebut. Sedangkan pihak Boeing memberi ganti rugi bersifat sukarela, sekitar Rp.1,6 M dengan 25 keluarga yang menerima kompensasi dan 40 keluarga dalam proses pembayaran.

Selain soal tidak ada Batasan waktu, belum selesainya kompensasi juga karena adanya beberapa keluarga Ahli Waris yang menolak untuk menandatangani dokumen Release and Discharge. Dokumen tersebut mewajibkan keluarga Ahli Waris melepaskan hak menuntut pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan.

Sebaliknya Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011, pasal 23 menyatakan: Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, Ahli Waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri.

Artinya, Para Ahli Waris diberi kebebasan yang dijamin undang-undangan untuk menuntut ke pengadilan, apabila ganti rugi tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Selain masalah tersebut, belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan menjadi salah satu masalah tersendiri.

Di luar soal batas waktu, Syaikhu melihat ada tiga hal lain yang mendesak dilakukan pihak-pihak terkait agar masalah ini tuntas.

Pertama, mendesak Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air, agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meminta syarat apapun kepada Ahli Waris.

Kedua, mendesak Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX sampai semua rekomendasi dari KNKT telah dijalankan dan seluruh kompensasi diberikan kepada Para Ahli Waris.

Ketiga, mendesak Lion Air agar aktif melayani keluarga Ahli Waris dengan cara membantu mendaftarkan kepada Boeing agar segera mendapatkan juga kompensasi.

"Kita berharap semua pihak beritikad baik agar hak-hak Para Ahli Waris terpenuhi," tutup Syaikhu.

HARI ASPIRASI

Aspirasi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air

Anggota Komisi V DPR RI H. Ahmad Syaikhu menerima aspirasi dari keluarga korban kecelakaan Lion Air pada Jum'at 8 November 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi terkait dengan pembayaran uang dari PT Lion air pada korban.

Foto : Erwinsyah / Humas FPKS

Pemerintah Harus Turun Tangan Bantu Konsumen Sriwijaya Air

"Kalau sejak awal diketahui bahwa kerjasama tersebut tidak memberikan manfaat bagi kedua pihak, kenapa perjanjian itu terjadi ? Kemudian terkait kerjasama bisnisnya, silahkan dibicarakan secara baik dan tanpa merugikan konsumen"

MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.
Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (8/11) --- Jangan karena Garuda ribut lagi dengan Sriwijaya Air, yang kena getahnya para konsumen. Calon penumpang sudah menunaikan kewajibannya dengan membeli tiket dan wajar konsumen mendapat haknya. Bagaimanapun hak dan kepentingan konsumen harus dijadikan prioritas.

Demikian disampaikan Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini disampaikan menyikapi 'pecah kongsi lagi' antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air, yang berakibat banyaknya penerbangan Sriwijaya Air dibatalkan.

"hari ini kita lihat ramai di media, yang memberitakan calon penumpang Sriwijaya Air terlantar karena penerbangan mereka dibatalkan, yang disebabkan terjadi konflik lagi antara Garuda Indonesia dengan Sriwijaya Air. Ini tentu mencoreng dunia penerbangan Indonesia, dan juga menunjukkan bahwa Konsumen berada dalam posisi lemah". Ucap Mahfudz.

Pemerintah lanjut Mahfudz, harus segera mencari solusi, baik Kementerian Perhubungan sebagai regulator dunia perhubungan dan juga Kementerian BUMN, karena Garuda Indonesia adalah dibawah pembinaan dan koordinasi Kementerian BUMN. Ungkap Anggota DPR RI yang mewakili warga Kota Bekasi dan warga Kota Depok.

"hak Konsumen di Indonesia di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga semua pihak harus menganggap serius peristiwa yang dialami oleh konsumen", tuturnya

Mahfudz menegaskan bahwa Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 sangat jelas menyatakan hak-hak dari Konsumen. Sehingga peristiwa yang dialami calon penumpang Sriwijaya Air hari ini jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang tersebut.

"semua pihak terkait harus bisa menunaikan kewajiban sesuai undang-undang tersebut dan kami juga meminta Kementerian BUMN untuk mengambil peran karena Garuda Indonesia merupakan Perusahaan BUMN," terang Mahfudz.

Dengan Tegas Mahfudz menyampaikan bahwa Kementerian BUMN harus meneliti perjanjian kerjasama dua maskapai penerbangan tersebut, apa saja yang terjadi dan kenapa bisa muncul konflik diantara mereka.

"Dan ini setahu kami sudah juga pernah terjadi masalah dalam perjanjian mereka, tapi kemudian berdamai, sekarang bermasalah lagi dan yang jadi korban para calon penumpang Sriwijaya Air," tegasnya.

"Kalau sejak awal diketahui bahwa kerjasama tersebut tidak memberikan manfaat bagi kedua pihak, kenapa perjanjian itu terjadi ? Kemudian terkait kerjasama bisnisnya, silahkan dibicarakan secara baik dan tanpa merugikan konsumen", tandasnya.

Hal ini menurut Mahfudz akan mengganggu kepercayaan publik kepada pelaku usaha penerbangan udara, baik secara domestik dan juga internasional.

"kami berharap agar pemerintah dapat mencarikan solusi terbaik dan juga agar tidak terulang lagi pada masa yang akan datang". Tutup Mahfudz Abdurrahman

Foto: Istimewa

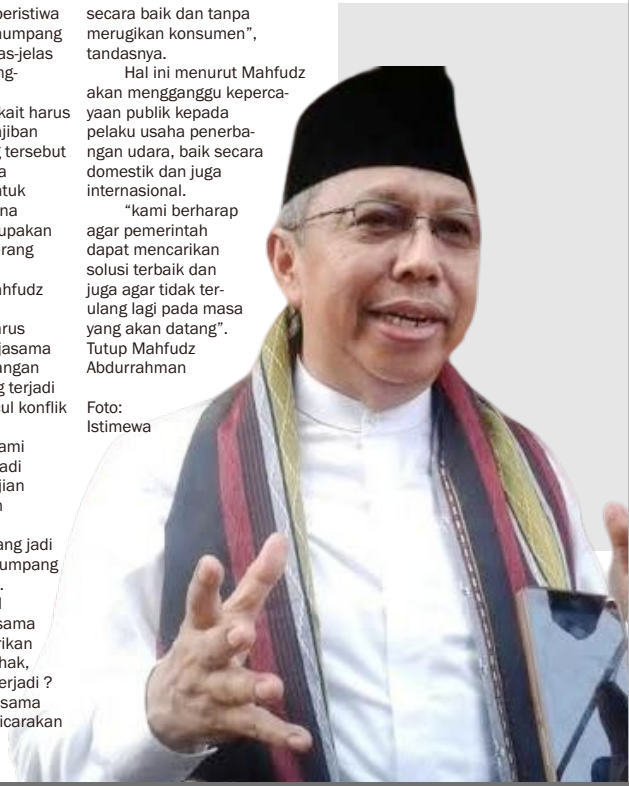

Investasi Anjlok, Tantangan Bagi Kabinet Baru

"Salah satu kunci lain adalah koordinasi antara lembaga pemerintahan, antar kementerian dan antar pemerintah pusat dan daerah. Semua harus sejalan dan kompak

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Jakarta (6/11) --- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III 2019 hanya tumbuh 4,21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal III 2018 sebesar 6,96%.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Komisi VI Chairul Anwar yang mengatakan bahwa kondisi ini merupakan tantangan bagi kabinet pemerintahan Jokowi periode ke dua.

"Kemarin BPS mengelurakan data bahwa PMTB kita menurun tajam dari 6,96% kuratal III tahun 2018 menjadi hanya 4,21% pada kuartal III 2019, ini warning bagi kabinet yang baru sekaligus menjadi tantangan besar untuk meningkatkan investasi di Indonesia," ungkap Chairul di Komplek Parlemen Senayan Rabu (06/11/2019).

Kabinet yang baru lanjut Chairul, harus melakukan terobosan yang tepat untuk meningkatkan investasi.

"Kabinet baru yang di pelopori oleh BKPM dan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi harus membuat terobosan yang tepat untuk meningkatkan investasi, Kepala BKPM yang baru harus segera mengambil langkah tepat, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dan para investor beralih ke negara lain," tegas anggota Komisi VI Dapil Riau 1 ini.

Chairul juga mengingatkan bahwa peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business atau EoDB) di Indonesia mengalami penurunan. Saat ini, peringkat kemudahan berusaha Indonesia versi Bank Dunia ada di urutan ke-73 dari 190 negara di dunia.

"Peringkat kemudahan usaha kita turun ke urutan 73 padahal pada 2017 lalu, Indonesia menempati posisi ke-72, bahkan diawal pemerintahan Jokowi-JK lalu menargetkan Indonesia mencapai urutan ke-40. Hal ini jadi PR besar kabinet baru untuk lebih meningkatkan lagi peringkat Indonesia," jelas Chairul.

Drs. Chairul Anwar Apt, Anggots Komisi VI DPR RI

Bebera hal yang menyebabkan penurunan investasi menurut politisi PKS asal Riau ini, salah satunya adalah masih kurang menyeluruhnya pemerintah dalam membuat program mendatangkan Investasi.

Chairul menyoroti masih belum berjalan dengan baiknya program Online Single Submission (OSS).

" Hasil evaluasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dirilis September lalu, mengungkapkan bahwa masih adanya kendala regulasi di pemerintah pusat dan daerah, selain itu diungkapkan juga masih kurang terintegrasnya sistem yang ada dalam OSS sehingga hal itu menghambat kelancaran sistem. Padahal awalnya Program OSS menjadi harapan besar dalam meningkatkan Investasi di Indonesia," ungkap Chairul.

Disamping itu peran koordinasi antar lembaga yang menjadi salah satu kunci dalam mendatangkan Investor.

"Salah satu kunci lain adalah koordinasi antara lembaga pemerintahan, antar kementerian dan antar pemerintah pusat dan daerah. Semua harus sejalan dan kompak, jangan lagi ada istilah ego sektoral dan ego kedaerahan semua harus memahami tujuan bersama untuk kemakmuran bangsa Inonesia," tutup Chairul.

Pemerintah Perlu Manfaatkan Peluang Ekspor ke Jepang

Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh

RAFLI
Anggota Komisi Vi DPR RI
Dapil NAD II

Jakarta (4/11) --- Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli meminta Pemerintah Aceh agar memanfaatkan peluang ekspor ke Jepang. Menurut Rafli ada banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa di ekspor ke negara Sakura.

"Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh," kata Rafli, Senin (4/11).

Menurutnya, Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang, diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli.

Dia mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp 140 triliun per tahun. Jika diasumsikan harga per kilogram Rp 700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun.

"Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh.

"Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Menyinggung UMKM, Rafli mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.

Dia berharap kesempatan ini menjadi inkubator mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.

image : istimewa

DPR minta Erick Tohir Sehatkan BUMN Hutang Besar

Jakarta (04/11) — Sepuluh perusahaan pelat merah yang memiliki utang terbesar mendapat perhatian anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina.

Nevi meminta Menteri BUMN dalam satu tahun kedepan lebih fokus dan lebih menyehatkan sejumlah BUMN yang menjadi kebanggaan. Namun memiliki hutang yang luar biasa banyaknya.

Perusahaan pemilik utang terbesar yang dimaksud Nevi antara lain : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Taspen, PT Waskita Karya Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Pupuk Indonesia.

"Perusahaan Perbankan, Energi, Telekomunikasi dan Infrastruktur, semua adalah andalan negara sebagai perwajahan kekuatan bangsa dalam mengelola sumber daya. Ini perlu penyehatan yang kuat agar lebih mandiri, merdeka dari hutang sehingga mampu memberikan sebesar-besarnya kontribusi dan manfaat untuk mayoritas rakyat Indonesia",

> Utang memang tidak salah, tapi harus tetap waspada. Bukan saja masalah harga diri bangsa, namun ini menyangkut masa depan seluruh rakyat Indonesia"
>
> **Hj. NEVI ZUAIRINA**
> Anggota Komisi VI DPR RI

ucap Nevi.

Anggota Legislator Sumatera Barat ini mengatakan, Kementerian BUMN agar terus waspada terhadap utang BUMN ini. Tercatat lima tahun terakhir, utang BUMN telah melonjak sangat besar. Pada Juli 2019, Utang Luar Negeri (ULN) BUMN Indonesia mencapai US$ 52,8. Meski hutang-hutang BUMN ini masih belum mengganggu arus kas, namun keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.

Politisi PKS ini menambahkan, bahwa utang luar negeri BUMN RI telah mengalami peningkatan sehingga tergambar sebagai tren. Kenaikan lebih dari US$ 6,3 miliar atau sekitar 13,8% hanya dalam waktu 6 bulan saja di periode Januari sampai Juli 2019. Angka ini memiliki proporsi sebesar 26,7% bila dibandingkan dengan total utang luar negeri swasta pada Juli 2019.

Hingga saat ini, lanjut Nevi, hutang dan Kinerja buruk BUMN itu yang menjadi salah satu faktor mengapa hanya 2 BUMN Indonesia yang berhasil menembus deretan 500 perusahaan terbesar di dunia versi majalah Fortune. Padahal, Indonesia memiliki size ekonomi di peringkat 16 besar dunia dalam kategori Negara dengan perekonomian terbesar. Indonesia pun masuk anggota G20.

"Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 862 miliar (tahun 2016), diperkirakan tahun 2030 nanti ekonomi Indonesia akan menduduki ranking 7 besar dunia, sejajar dengan Amerika Serikat dan China", katanya.

Sayangnya, tambah Nevi, size korporat (BUMN) tak merefleksikan size ekonomi Nasional yang besar itu. Dari ratusan BUMN, hanya Pertamina dan PLN yang masuk Fortune 500. Sayangnya, BUMN harusnya cerminan aset yang dibanggakan sebuah Negara. Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat disebuah Negara, ditandai dengan performa BUMNnya sebagai The True Player In The World.

"Untuk mengurus BUMN ini, pak Menteri perlu dukungan banyak pihak karena ini sebagai salah satu penyebab, apakah negara akan maju atau akan hancur tergantung cara mengelolanya. Utang memang tidak salah, tapi harus tetap waspada. Bukan saja masalah harga diri bangsa, namun ini menyangkut masa depan seluruh rakyat Indonesia", tutup Nevi Zuairina.

HJ. NEVI ZUAIRINA Anggota Komisi VI DPR RI

Raker dengan Menteri, Amin Minta Investasi Bodong Ditertibkan

Beberapa oknum yang melakukan hal tersebut memanfaatkan badan hukum koperasi yang sebelumnya telah terdaftar. Ini harus segera ditertibkan agar tidak jatuh korban lagi

AMIN AK,MM
Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (8/11) --- Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta kementerian menertibkan badan usaha berbasis koperasi yang melakukan investasi bodong.

Sepanjang tahun 2019 ini, kata Amin, ditemukan sebanyak 153 badan usaha yang menipu masyarakat lewat investasi bodong, seluruhnya mengatasnamakan koperasi simpan pinjam (KSP).

"Koperasi tersebut melakukan aktivitas penjaringan dana dari anggota atau masyarakat namun dana investasinya diselewengkan. Beberapa oknum yang melakukan hal tersebut memanfaatkan badan hukum koperasi yang sebelumnya telah terdaftar. Ini harus segera ditertibkan agar tidak jatuh korban lagi," tegas Amin Ak.

Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu meminta Kementerian Koperasi harus menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan penindakan.

Menurut Amin, Kementerian Koperasi bisa memaksikmalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk melakukan pengawasan yang saat ini jumlahnya mencapai 1.235 orang PPKL yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten menyampaikan pagu alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk 2020 sebesar Rp972,3 miliar. Dari jumlah itu program penguatan kelembagaan koperasi sebesar 3 persen dan program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro sebesar 9 persen dari total anggaran.

"Anggaran terbesar dialokasikan untuk program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi yang mencapai 56 persen dari seluruh total anggaran," ungkap Teten.

Menanggapi hal itu, Amin berharap ke depan pagu anggaran Kemenkop dan UKM bisa ditingkatkan mengingatkan salah satu tugasnya menciptakan ribuan entrepreuner baru agar tercipta banyak lapangan kerja.

Kemenkop dan UKM harus menjadi garda terdepan dari keberpihakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, serta mendorong pelaku usaha mikro tumbuh besar menjadi pengusaha nasional yang berdaya saing.

Amin mengapresiasi lima program strategis Kemenkop dan UKM, yakni pengembangan dan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing dan kapasitas produk dan jasa UMKM, pembiayaan dan investasi yang mudah, pengembangan kapasitas manajemen usaha, serta pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha.

"Kita harus banyak menciptakan pelaku usaha baru yang mampu menyediakan lapangan kerja baru. Jangan sampai bonus demografi yang sudah dimulai tahun depan gagal dioptimalkan. Dan saya berharap Kemenkop dan UKM bisa menjadi ujung tombak negara dalam menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

FRAKSI PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih Pahlawan

HARI PAHLAWAN - 10 NOVEMBER

*"**Hakikat kepahlawanan** adalah **kontribusi** dan **dedikasi**. **Karya nyata** lebih esensi daripada **gelar pahlawan** itu sendiri"*

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

DITUGASKAN DI KOMISI VII

Uluputty Siap Kawal Isu Strategis Energi dan Lingkungan

> "Subsidi listrik, subsidi BBM dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan kami perjuangkan. Ini untuk menegaskan komitmen saya dan PKS untuk terus berbuat yang lebih baik

SAADIAH ULUPUTTY, ST
Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (4/11) -- Fraksi PKS telah mengutus 50 kadernya menyebar di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Periode 2019-2024. Porsi PKS untuk posisi pimpinan AKD yakni, Ketua MKD, Wakil Ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi IX, Wakil ketua Komisi X, Wakil ketua BKSAP, Wakil ketua BURT dan wakil ketua BAKN.

Selain tujuh unsur pimpinan AKD, 43 orang anggota lainnya disebar merata ke 11 komisi.

Saadiah uluputty, Anggota DPR RI Dapil Maluku ditugaskan di Komisi VII. Dirinya menjelaskan, akan mengawal sejumlah isu-isu strategis.

"Saya di Komisi VII. Yang akan kita kawal yakni persoalan Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Dia menambahkan sejumlah sektor yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat juga akan diperjuangkan. Perjuangan tersebut, kata dia, sebagai bukti komitmennya Bersama PKS memberi yang terbaik kepada rakyat Indonesia.

"Subsidi listrik, subsidi BBM dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan kami perjuangkan. Ini untuk menegaskan komitmen saya dan PKS untuk terus berbuat yang lebih baik," kata Saadiah.

Selain itu, lulusan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya itu melanjutkan, dia akan turut mengawal pengelolaan blok-blok migas raksasa, perminyakan dan usaha hilirisasi pertambangan.

"Kami juga akan kawal blok-blok migas raksasa, minyak dan pertambangan," paparnya.

Terkait Blok Gas Abadi Masela di maluku, Uluputty memberikan penekanan agar Presiden segera menandatangani PI 10 % bagi Maluku. Menurutnya, hal tersebut perlu dipercepat karena Pod dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah diserahkan kepada pemerintah.

"Pak Presiden harus segera tandatangi PI 10 % untuk Maluku. Itu sudah jelas diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Blok Masela hanya masuk dalam wilayah Administrasi Maluku. PoD dari KKKS sudah ada jadi realisasi PI 10 % segera direalisasi," tegasnya.

Dia menuturkan, penempatannya di Komisi VII menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat.

"Ini tantangan sekaligus kesempatan untuk berkhidmat untuk masyarakat di dapil khususnya dan Indonesia pada umumnya," jelasnya.

SAADIAH ULUPUTTY, ST Anggota Komisi VII DPR RI (Foto : Ardian / Humas Fraksi PKS DPR RI)

RUU Terkait Lingkungan Harus Jadi Prioritas

Jakarta (7/11) --- DPR RI Periode 2019-2024 minggu pertama-kedua November ini tengah fokus merumuskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik yang bersifat jangka menengah 5 tahunan, maupun yang berisfat jangka pendek prioritas tahunan. Berbagai masukan RUU dari Pemerintah ataupun masyarakat dikanalisasi lewat Komisi-komisi maupun fraksi.

RUU terkait dengan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, yang berada dalam koordinasi Komisi VII mendapat perhatian Anggota DPR RI komisi VII, Mulyanto.

"DPR saat ini tengah fokus bekerja melakukan seleksi dan prioritisasi berbagai usulan RUU, baik yang datang dari pemerintah maupun masyarakat, untuk kemudian disusun menjadi Prolegnas jangka menengah, maupun prioritas tahun 2020", ucapnya.

Menurut Mulyanto, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS, Komisi VII sendiri sangat konsern dengan isu terkait dengan pembangunan lingkungan hidup.

"Ya, inikan lumrah, karena mitra kita adalah Kementerian ESDM, Kemenristek dan KLHK. Apalagi pengawasan pembangunan energi dan tambang sumber daya mineral sangat terkait dengan aspek lingkungan", jelasnya.

> Karena permasalahan lingkungan hidup yang semakin luas dan melibatkan pelaku lintas sektor, memerlukan kelembagaan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat, agar pelaksanaannya di lapangan menjadi efektif
>
> **DR.H. MULYANTO, M.Eng.**
> Anggota DPR RI Komisi VII

Dalam sudut pandang tertentu, aspek lingkungan hidup menjadi obyek sekaligus instrumen pengawasan bagi Komisi VII.

"Saya melihatnya seperti itu. Di satu sisi pembangunan lingkungan hidup menjadi obyek bidang kerja kita, namun dari sisi lain aspek lingkungan hidup menjadi instrument pengawasan bagi pembangunan bidang lain dalam lingkup kerja komisi VII ini", imbuhnya.

Menurut Mulyanto, yang juga anggota Baleg, dari rencana 7 RUU untuk Prolegnas 2020-2024, yang tengah digodok Komisi sebagian besarnya terkait dengan isu lingkungan hidup. Bahkan secara khusus telah masuk usulan RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.

"Karena permasalahan lingkungan hidup yang semakin luas dan melibatkan pelaku lintas sektor, memerlukan kelembagaan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat, agar pelaksanaannya di lapangan menjadi efektif", tutupnya.

Kemandirian Energi dan Penggunaannya Perlu Kajian Mendalam

Saya yakin, dengan langkah-langkah yang tepat PLTSa ini bisa menjawab permasalahan sampah yang selama ini menjadi momok perkotaan, sekaligus menuju lingkungan yang asri, bersih, dan sehat"

H. ROFIK HANANTO, SE
Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (04/11) --- Krisis energi telah menjadi isu global yang terus dicari solusinya oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah dengan mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai kota di Indonesia. PLTSa menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofik Hananto.

Menurut Rofik PLTSa dianggap menjadi solusi alternatif dalam mengantisipasi ancaman krisis energi di masa depan melalui peran energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan akan ada 12 PLTSa yang akan beroperasi pada tahun 2022.

"Upaya ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengejar target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia pada tahun 2025. Apalagi pemerintah juga telah mengatur dalam PP 79/ 2014 untuk memprioritaskan pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan", ungkapnya.

Rofik menambahkan pembangunan PLTSa tersebut merupakan salah satu langkah tepat dalam mengelola permasalahan sampah perkotaan di Indonesia.

"Sebenarnya upaya pembangunan PLTSa ini menjadi solusi alternatif dalam memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tempat guna. Jadi tidak hanya mengantisipasi krisis energi namun sekaligus sebagai solusi menuju lingkungan yang bersih dan sehat", tuturnya.

Menurut informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kehadiran 12 PLTSa tersebut digadang-gadang akan menghasilkan total kapasitas 234 megawatt (MW) dari produksi sekitar 16.000 ton sampah.

Dengan potensi dampak positif yang besar tersebut, Rofik sebagai anggota Komisi VII yang fokus di bidang Energi dan Lingkungan Hidup, memberikan masukan permasalahan yang akan timbul dalam aplikasi di lapangannya.

H. ROFIK HANANTO, SE Anggota Komisi VII DPR RI

"Ada dua permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Pertama terkait perdebatan pengkategorian PLTSa sebagai sumber energi terbarukan. Definisi PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan ini kan muncul dalam Perpres 18/2016, dan penggantinya, Perpres 35/2018, definisi tersebut sudah tidak ada, namun implementasi di lapangan itu PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi baru dan terbarukan. Juga terkait teknologi ramah lingkungan itu yang seperti apa juga harus jelas. Misalnya umumnya sampah kota itu dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan karena dianggap sebagai bioenergi. Sedangkan pemerintah mendefinisikan tidak semua jenis sampah termasuk dalam kategori bioenergi, namun hanya yang bersumber dari sampah organik saja. Ini semua harus clear dulu.", jelas Rofik.

Lebih lanjut Rofik menambahkan permasalahan kedua terkait dampak lingkungan dari pengembangan teknologi PLTSa itu sendiri.

"Permasalahan kedua muncul malah dari dampaknya. PLTSa ini kan menggunakan teknologi bakar atau termal. Justru teknologi tersebut kerap menjadi masalah karena mengandung permasalahan dari aspek lingkungan dan ekonomi. Ini juga berkaitan dengan dampak kesehatan manusia, mulai dari ancaman kanker hingga serangan jantung", ungkapnya.

Sekilas cara kerja PLTSa ini ialah sampah diolah sehingga menghasilkan gas methan yang kemudian dibakar untuk menghasilkan panas dan digunakan untuk memanaskan uap untuk menggerakkan turbin uap yang tersambung pada generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Rofik berharap, upaya positif pemerintah harus didampingi dengan kajian mendalam.

"Upaya pemerintah terkait PLTSa ini perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh, agar berdampak baik dari hulu ke hilir. Pemerintah juga perlu menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder. Saya yakin, dengan langkah-langkah yang tepat PLTSa ini bisa menjawab permasalahan sampah yang selama ini menjadi momok perkotaan, sekaligus menuju lingkungan yang asri, bersih, dan sehat", pungkasnya

HNW Ingatkan Menag Fokus Pada Tupoksi Daripada Isu Radikalisme

"Saya minta Kementerian Agama memaksimalkan program 5000 doktor ini agar kualitas pendidikan tinggi Islam tidak kalah dengan pendidikan tinggi lainnya. Kita ingin Indonesia menjadi mercusuar keilmuan Islam di dunia"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.
Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (8/11) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Agama Fachrul Rozi untuk fokus terhadap tugas pokok dan fungsi, diantaranya terkait anggaran dan program kerja Kementerian Agama untuk tahun 2020, daripada menimbulkan polemik dan kegaduhan dengan isu radikalisme.

Menurutnya, polemik seputar radikalisme tidak akan produktif karena definisinya belum disepakati, apalagi jika dibuat istilah baru manipulator agama yang semakin tidak jelas tolak ukurnya.

"Memanipulasi agama dalam Islam memang tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an, ada surah Al-Ma'un yang menyebutkan bahwa diantara bentuk memanipulasi agama adalah mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim dan kaum dhuafa, serta orang-orang yang sholat tapi riya'", tuturnya.

HNW menambahkan dalam hadits juga disebutkan ada yang memanipulasi agama, yaitu orang-orang munafik, yang ciri-cirinya adalah jika bicara mereka tidak jujur, bila berjanji mereka mengingkari, dan bila diberi amanah mereka berkhianat.

"Radikalisme ini tidak bisa dikaitkan dengan agama Islam, sebagaimana yang juga dinyatakan oleh beberapa tokoh seperti Jusuf Kalla, Moh Mahfud MD, Kapolri, dan lainnya," imbuhnya.

Lebih lanjut HNW berkata "Sejarah pendirian Kementerian Agama juga dalam rangka menyatukan bangsa dan mengapresiasi umat Islam yang memiliki saham besar untuk menyelamatkan proklamasi Indonesia dan kesatuan negara dengan menyetujui sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," demikian disampaikan Hidayat dalam Rapat Kerja

dengan Kementerian Agama di DPR-RI, Kamis (7/11).

Menurut HNW pernyataan melawan radikalisme yang disampaikan oleh Menag perlu dikoreksi, sehingga tidak hanya (dan juga tidak boleh) dikaitkan terhadap agama (tertentu). Melainkan, pernyataan atau program kerja tersebut itu perlu diarahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap agama dari sikap radikal dalam bentuk terorisme, komunisme dan separatisme yang dapat memecahbelah dan menghadirkan rasa saling curiga sesama anak bangsa serta mengancam keberlangsungan agama di Indonesia, sejalan dengan Tupoksi Kemenag berdasarkan peraturan perundang-undangan", tegasnya.

Menurut Hidayat, Menag seharusnya juga fokus pada tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga 5 November 2019 penyerapan anggaran Kementerian Agama baru mencapai angka 78%. Penyerapan anggaran tertinggi ada pada program dukungan manajemen (88,16%) dan penyerapan terendah terdapat pada program BPJPH (24,33%).

"Penyerapan anggaran yang belum maksimal mengakibatkan manfaat program Kementerian Agama tidak bisa secara maksimal diterima oleh masyarakat, seperti tunjangan kinerja Guru madrasah, Beasiswa Operasional Siswa madrasah, bimbingan agama untuk masyarakat, dan lain-lain", ujarnya.

Hidayat Nur Wahid secara khusus menyoroti tidak dimasukkannya program 5000 doktor dalam program prioritas Kementerian Agama 2020, padahal program tersebut merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi dan sudah diresmikan sejak Desember 2014. Bahkan, Kementerian Ristekdikti dengan anggaran yang lebih kecil dari Kemenag mampu menargetkan beasiswa 6.034 dosen dan memasukkannya sebagai salah satu output prioritas 2020.

"Saya minta Kementerian Agama memaksimalkan program 5000 doktor ini agar kualitas pendidikan tinggi Islam tidak kalah dengan pendidikan tinggi lainnya. Kita ingin Indonesia menjadi mercusuar keilmuan Islam di dunia", ucapnya.

Anggota DPR-RI Komisi VIII dari Fraksi PKS ini juga meminta Kemenag memastikan kelangsungan dan kelancaran pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

"Pendirian UIII agar diperjuangkan untuk dapat beroperasi di 2020 sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Agama pada raker kali ini", tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII DPR-RI mengadakan rapat kerja perdana di masa sidang I periode 2019-2024 dengan Kementerian Agama pada Kamis, (7/11). Beberapa program yang dibahas adalah Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019, Rencana program tahun 2020, dan isu-isu aktual lainnya

DPR Minta Menag Fokus pada Fungsi Pendidikan dan Keagamaan

Jakarta (7/11) -- Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, H. Nurhasan Zaidi meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bijak menerjemahkan pesan deradikalisme presiden yang harus diembannya serta fokus pada tupoksi Kemenag yakni fungsi keagamaan dan pendidikan.

Nurhasan berharap sikap moderasi beragama harus tercermin oleh sikap dan tutur kata menteri beserta jajarannya, yang disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

"Kementerian Agama seharusnya mampu menghadirkan iklim kehidupan bernegara yang damai dan tentram. Kita lihat isu radikal jauh lebih kencang dibandingkan dengan pesan moderasi beragama yang menjadi sasaran program prioritas kementrian, ini bahaya", ungkap Nurhasan.

Politisi PKS dari dapil Jawa Barat IX ini menilai bahwa hal tersebut bukan hanya membuat gaduh kehidupan sosial di masyarakat, tapi juga aspek politik dan ekonomi. Statement larangan celana cingkrang dan cadar bagi ASN yang diidentikkan dengan radikalisme akan menjadi catatan bagi msyarakat umum dan dunia usaha, sehingga perlu komunikasi publik yang baik untuk setiap langkah yang digulirkan.

"Fungsi pendidikan dan keagamaan harus tercermin dalam visi yang diurai oleh menteri agama. Konsepsi moderasi beragama, kualitas pendidikan berbasis agama, keshalehan sosial, jaminan produk halal, dan layanan keagamaan. Beban ini cukup berat, seluruh komponen harus sinergis bergerak, mulai dari menteri hingga tenaga honorer tenaga penyuluh di lapangan, banyak hal yang perlu dibenahi", lanjutnya.

Nurhasan menambahkan pihaknya sering berdialog dengan penyuluh-penyuluh agama, mereka belum tersentuh secara optimal secara pembinaan dan penganggaran. Hanya dapat intensif 1 juta perbulan dengan tugas yang cukup berat dan mulia, berbeda dengan penyuluh-penyuluh lain misal pertanian, peikanan dan peternakan ini 2 sampai 3 kali lipat.

"Karena itu, penyuluh agama yang merupakan ujung tombak kemenag harus menjadi prioritas untuk diting-katkan kualitas dan isi tas nya pada APBN 2020", pungkasnya.

Image : Istimewa
Photo : Ardian

PKS: Menteri Agama Gagal Fokus!

"Program sebagus apapun tidak akan berhasil jika persoalan korupsi di tubuh kemenag tidak di tuntaskan sampai ke akar-akarnya, memecat pegawai yang terbukti korupsi belum cukup, perlu pembenahan serius secara sistemik

KH. BUKHORI YUSUF, Lc., MA
Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (9/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Menteri Agama Fachrul Razi telah gagal fokus dalam menyusun program tahun 2020.

Bukhori menilai Menteri Agama Fachrul Razi tidak memahami problem lembaganya secara utuh. Hal ini disampaikan dalam rapat perdana menteri Agama dengan komisi VIII di Gedung DPR RI kemarin (7/11)

Lebih lanjut Ketua Poksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan bahwa persoalan korupsi di Kementerian Agama (kemenag) saat ini sangat fundamental untuk diselesaikan.

"Pak Menteri mungkin perlu diingatkan kembali, bahwa dalam tiga masa pemerintahan Indonesia, Kementerian Agama acapkali tersandung kasus korupsi yakni kurun waktu 2001-2005 dalam kasus korupsi penyalahgunaan biaya haji dan dana abadi umat yang menyeret Menteri agama Said Agil Husin ALmunawar, kemudian 2011- 2012 terkait kasus korupsi Pengadaan Alquran dan laboratorium madrasah, kemudian 2014-2016 terkait kasus korupsi penyalahgunaan biaya haji dan dana operasional menteri yang menyeret Menteri agama lagi yakni Suryadharma Ali dan yang terjadi baru-baru saja pada 2019 terkait jual beli jabatan" ungkap Bukhori saat rapat.

Bukhori menyayangkan, di tengah gentingnya upaya reformasi di tubuh Kemenag, namun tidak ada satupun program terkait pencegahan korupsi dalam daftar program prioritas kemenag tahun 2020.

"anehnya yang muncul di permukaan justru program menangkal radikalisme lewat moderasi beragama, padahal soal cadar, celana cingkrang itumah persoalan cemen, Pak Menteri tidak perlu ngurusin yang begituan" tambah Bukhori.

Lebih lanjut Bukhori mengatakan persoalan korupsi di tubuh kemenag itu adalah masalah fundamental yang harus diselesaikan.

"Program sebagus apapun tidak akan berhasil jika persoalan korupsi di tubuh kemenag tidak di tuntaskan sampai ke akar-akarnya, memecat pegawai yang terbukti korupsi belum cukup, perlu pembenahan serius secara sistemik," ungkap Bukhori.

Untuk itu Bukhori berharap Menteri Agama Fachrul Razi tidak mengikuti jejak pendahulunya yang terlibat korupsi.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh di internal kemenag sehingga Pak Menteri tidak gagal paham dalam menyusun program kerja prioritas apa yang akan dijalankan Kemenag tahun 2020," tegas Bukhori

Diakhir pernyataannya Bukhori pun melantunkan pantun: "Burung angsa pandai berenang
Di air beriak dan air teduh
Kalau bangsa sudah tenang
Pak menag jangan mem bikin gaduh"
pantun pun disambut tawa peserta Rapat.

Mufida: Komitmen Kami Tetap, Rakyat Jangan Jadi Korban Defisit BPJS

"Kita sudah sampaikan tidak setuju kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III, karena memberatkan masyarakat. Rakyat jangan jadi korban defisit BPJS

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (7/11) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan bersama sejumlah badan, yang berlangsung maraton sejak pukul 10.00 hingga 23.00 Rabu (5/11/2019), belum menghasilkan kesepakatan tentang kenaikan iuran BPJS.

Lontaran ketidaksetujuan atas kenaikan iuran BPJS khususnya untuk Kelas III, bergantian disampaikan anggota Komisi IX termasuk Anggota DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati.

"Kita sudah sampaikan tidak setuju kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III, karena memberatkan masyarakat. Rakyat jangan jadi korban defisit BPJS," tegas Mufida.

Mufida menjelaskan, belum tercapainya kesepakatan ini karena permintaan komisi 9 belum bisa disepakati bersama pemerintah. Selain itu, beberapa keputusan Rapat Gabungan 2 September 2019 belum dijalankan oleh pemerintah, termasuk soal data cleansing. Walau sudah selesai secara teknis tapi belum menjadi keputusan hasilnya. Pemerintah dianggap mengabaikan hasil rapat gabungan Komisi IX, Komisi X dan pemerintah pada tanggal 2 September 2019 tersebut jika tetap memaksakan kenaikan iuran BPJS.

"Hasil rapat gabungan tersebut telah menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sampai data cleansing diselesaikan," papar Mufida.

Anggota Komisi IX, jelas Mufida, menyesalkan pemerintah mengumumkan kenaikan iuran BPJS tanpa adanya komunikasi dengan komisi IX.

"Ini sangat tidak bisa diterima," tegasnya.

Rapat rencananya dilanjutkan Kamis (7/11/2019) pukul 19 malam ini. Dijelaskan Mufida, ada beberapa hal yang akan dikawal oleh para anggota Komisi IX malam ini. Selain meminta iuran BPJS kelas III tidak naik, ada hal lain yg penting juga. Yaitu Data cleansing untuk memastikan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS valid.

Mufida melanjutkan, hasil audit BPKP mengungkapkan adanya sekitar 10.654.530 peserta JKN bermasalah dan harus dilakukan data cleansing.

"Saya usulkan rapat kali ini ada follow up rapat gabungan lagi, melibatkan semua stake holder agar klasifikasi PBI ini benar-benar tepat sasaran," tandas Mufida.

PERSEMBAHAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DPR - RI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS

DISKUSI PUBLIK

Sehatkan BPJS Sehatkan INDONESIA

HADIRILAH

Selasa

12 November 2019
Pk. 13.00 - selesai
Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI
Gedung Nusantara I, Lt 3.

LIVE
Facebok Live
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

PEMBUKAAN

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

PEMBICARA

LetjenTNI (Purn) Dr dr. Terawan Agus P, Sp. Rad (K)
Menteri Kesehatan RI

Prof. Dr. dr. Fahmi Idris, M.Kes
Dirut BPJS Kesehatan

dr. Kuntjoro AP, M.Kes
Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

PSSI harus membereskan banyak pekerjaan rumah lainnya. Antara lain soal tata kelola jadwal kompetisi yang banyak ditunda. Pembibitan pemain yang baik dan berjenjang itu bermula dari kompetisi yang sehat dan teratur, harus segera dibenahi

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

PR Ketua PSSI Baru: Prestasi Melorot, Hingga Kesejahteraan Pemain

Jakarta (4/11) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul FIkri Faqih menyambut baik terpilihnya Komjen Pol Muhammad Iriawan atau akrab disapa "Iwan Bule" sebagai Ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023.

"PSSI saat ini butuh kepemimpinan yang kuat, semoga beliau mampu membawa timnas kita menuju prestasi puncaknya di dunia internasional." Ucap Fikri di Senayan, Selasa (5/11).

Fikri menilai, saat ini PSSI memiliki sejumlah tugas berat, terutama karena Indonesia menjadi tuan rumah bagi piala dunia usia dibawah 20 (U-20) pada tahun 2021 mendatang.

"Di bawah kepemimpinan bang Iwan, timnas bukan cuma tuan rumah, tapi harapan publik juga besar, paling tidak menyabet gelar untuk pertama kalinya," ujar politisi PKS ini.

Peringkat Indonesia di FIFA, diketahui juga merosot tajam, setelah timnas senior menerima beberapa kekalahan dalam beberapa laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada Juli 2019 lalu, peringkat Indonesia masih bertengger di urutan 160. Namun, rilis terakhir FIFA, pada 24 Oktober melorot ke peringkat 171.

"Bagaimanapun prestasi PSSI dinilai dari raihan timnasnya, dan membenahi prestasi bukan pekerjaan instan," ujar Fikri. Karena itu menurut dia, publik akan menaruh harapan besar pada Iwan Bule agar mampu membawa garuda muda (U-20) lebih berkilau dibanding timnas senior saat ini.

Di sisi lain, dunia sepakbola kita masih dihantui masalah kesejahteraan para atletnya. Beberapa hari sebelum Kongres Luar Biasa PSSI digelar, kabar duka datang dari bintang timnas U-16 asal Ambon, Alfin Lestiluhu yang meninggal dunia karena infeksi otak.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI (Foto: dpr.go.id)

Sebelumnya diketahui Alfin merupakan korban gempa Ambon pada September silam. Bersama keluarganya, Alfin terpaksa hidup di pengungsian. Disinyalir, selama di pengungsian tersebut atlet berusia 15 tahun dan penyumbang gol timnas pada kualifikasi Piala Asia ini terkena serangan virus yang menyerang otaknya.

Alfin sempat dirawat di Ambon 10 hari, sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta oleh PSSI untuk dirawat secara intensif. Sayang, nyawa Alfin tidak tertolong. "Kasus ini memberi pelajaran bagi kita bagaimana memperhatikan kesejahteraan atlet muda sebagai aset bangsa," imbuh Fikri.

Tidak berbeda dengan Alfin, pesekpabola muda dari klub Mitra Kukar dan pernah bermain di Persita Tangerang, Dibyo Caesario meninggal karena infeksi di paru-paru dan jantung pada 2017 silam. Mirisnya pemain 24 tahun itu harus menjual rumahnya demi biaya pengobatan. Bahkan, beberapa teman dan kolega menggelar pertandingan amal untuk membantu biaya rumah sakit bagi Dibyo.

"Hal itu menunjukkan bahwa belum ada perhatian atas jaminan kesehatan bagi para atlet sepakbola kita, PSSI mestinya bisa memulai," tutur FIkri.

Selain masalah di atas, PSSI nilai fikri juga harus membereskan banyak pekerjaan rumah lainnya. Antara lain soal tata kelola jadwal kompetisi yang banyak ditunda. "Pembibitan pemain yang baik dan berjenjang itu bermula dari kompetisi yang sehat dan teratur, harus segera dibenahi," ujarnya.

Selain itu, FIkri berharap sosok jenderal polisi seperti Iwan bule mampu menyelesaikan masalah yang bisa dikategorikan pidana dalam olahraga kulit bundar itu. "Sebut saja soal perjudian dan pengaturan skor," tegas Fikri.

Saya berharap dengan Ketum PSSI yang baru dapat menjadikan Sepak Bola kita menjadi lebih berprestasi dan membanggakan.

Dr., MM. Med
FAHMY ALAYDROES

Harapan Terpilihnya Ketua Umum PSSI yang Baru

Jakarta (3/11) --- Terpilihnya Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umumm PSSI baru periode 2019-2024 mendapatkan perhatian anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmi Alaydrus.

Fahmi mengucapkan selamat atas terpilihnya Mochamad Irwan, semoga dunia sepak bola nasional menjadi ajang prestasi, prestise, dan tentu saja edukasi.

"Sepak bola itu olahraga yg sangat merakyat, digemari semua orang, dari segala usia, baik pria maupun wanita", ucap Fahmi.

Di negeri ini, kata Fahmi meski dari sisi prestasi belum begitu membanggakan, tapi antusiasme, gairah, dan semangat mendukung dari para penggemarnya sangat luar biasa, bahkan sering kebablasan sampai bentrokan dan tawuran antar pendukung masing-masing klub.

"Alhasil, dunia sepak bola di Indonesia sangat menjanjikan, apalagi dari perspektif sepakbola sebagai dunia industri. Indonesia menjadi salah satu 'pasar' industri sepak bola yang subur, karena jumlah penggemarnya, lebih dari 200 juta orang", tegasnya.

Menurut Fahmi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan pada olahraga sepak bola, terutama saat menyaksilan tim nasional sedang berlaga.

"Indonesia menempati urutan ke dua di dunia sebagai penggemar olahraga sepakbola ! Dalam hal persentase ketertarikan seluruh populasi negara pada sepak bola, Indonesia hanya kalah dari Nigeria (83% penduduknya menyukai sepak bola).

arenanya, tidak mengherankan bila FIFA memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2020 yang akan datang. Indonesia adalah pasar besar dan subur bagi industri sepakbola", terang Fahmi.

Sebagai penggemar sepakbola sejak kecil dan sekaligus pegiat pendidikan, Fahmi sangat berharap olahraga Sepak Bola dapat menjadi sarana dan media pendidikan karakter bagi putera-puteri dan para pemuda Indonesia.

"Setidaknya dalam hal pembinaan karakter Semangat, Disiplin dan Kerja keras. Menjadi pemain sepak bola yg baik dan berprestasi harus dengan modal semangat, disiplin, dan kerja keras dalam belajar dan melatih diri, baik dari sisi ketahanan fisik/stamina maupun keterampilan/skill. Tidak cukup hanya bermodalkan minat dan bakat saja" tuturnya.

Fahmi menambahkan hal lain seperti soliditas dan Kekompakan dalam Kerjasama Tim. Sepak bola adalah permainan dan olahraga regu (tim) yang menuntut kerjasama yang kompak, saling support, saling mengerti dan memahami tugas masing-masing untuk tujuan bersama. Tidak ada tempat bagi sifat dan sikap individualis yang cenderung mementingkan diri sendiri dan kurang peduli dengan rekan sekelompoknya.

"Fairness & Sportifitas. Sepak bola adalah olahraga pertandingan dan kompetisi. Sejak awal sudah harus ditanamkan semangat meraih prestasi, semangat berkompetisi dengan lawan tanding dalam satu arena pertandingan yang dibatasi dengan segala peraturan yang ketat dan harus ditaati. Bertanding dengan jiwa ksatria, menghormati peraturan dan lawan tanding, serta berjiwa besar adalah karakter sejati sang juara. Menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian dan konsekuensi dari pertandingan", lanjutnya.

Hal lain yang tak kalah penting uacap Fahmi adalah kemampuan beradaptasi dalam berbagai medan dan situasi. Pemain sepak bola yang baik, selalu siap dan terbiasa bermain dan bertanding dalam berbagai iklim, cuaca, dan tekanan penonton yang jadi lawan tanding. Mental baja dan kematangan emosi sangat diperlukan. Tidak ada tempat bagi pemain dengan fisik yang lemah, 'baperan', mudah tersinggung, atau ngambekan;

Terakhir Sepakbola kita harus bersahaja, karena pemain yg berprestasi dan populer, sejatinya adalah mereka yang memiliki sikap dan kepribadian yang bersahaja. Mereka adalah orang-orang yang mencintai negara dan agamanya, hormat dan sayang kepada keluarganya, dan sangat peduli dengan sesama, terutama kepada yang sangat membutuhkan pertolongan.

"Saya berharap, Mochamad Iriawan, sebagai Ketum PSSI yang baru dapat menjadikan dunia Sepak Bola kita menjadi lebih semarak, berprestasi dan membanggakan, dan yang lebih penting lagi dapat menjadikan olahraga Sepak Bola sebagai ajang pendidikan karakter positif bagi putera-puteri, pemuda-pemudi, serta masyarakat penggemar sepak bola pada umumnya", harap Fahmi.

Dengan tegas Fahmi melanjutkan, tidak ada lagi tawuran antar pendukung, tidal ada lagi pengrusakan dan pembakaran stadion, tidak ada 'pengaturan' permainan.

"Visi-misi yang jelas, Model dan keteladanan dari para tokoh dan pimpinan Sepak Bola Nasional, kerjasama dan optimalisasi dengan Insan Media sangat diperlukan. Kolaborasi dengan berbagai stakeholders yang relevan sangat dibutuhkan. Kita semua berharap dan mendukung agar Sepak Bola Nasional kita berjaya dan bermanfaat bagi Negara dan Bangsa. Kepada Bapak Ketum PSSI yang baru, Selamat Bekerja, semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya", tutup Fahmi

Aplikasi Sistem Pendidikan Perlu Pertimbangan Sangat Cermat

Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik. Namun Pak Menteri harus ingat dan berfokus pada tujuan pendidikan yang menjadi pondasi dasar sistem pendidikan di negeri ini

Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (4/11) — Rencana Mendikbud Nadiem Makarim membuat aplikasi sistem pendidikan sebagai salah satu program 100 hari pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia maju mendapat perhatian dan masukan anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

"Semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital. Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik. Namun Pak Menteri harus ingat dan berfokus pada tujuan pendidikan yang menjadi pondasi dasar sistem pendidikan di negeri ini," ucapnya.

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Membaca tujuan pendidikan nasional ini, papar aleg dari Fraksi PKS ini pula, kita bisa memahami bawah tumbuh kembangnya karakter dan kepribadian peserta didik secara positip menjadi fokus utama. Tujuan ini juga jelas membutuhkan satu kerjasama yang tak terpisah antara antara orang tua, tenaga kependidikan, masyarakat dan pemerintah secara umum. Sementara secara lebih spesifik, dalam konteks pendidikan di sekolah baik formal maupun informal kehadiran guru memegang peran kunci untuk mewujudkan

tujuan tersebut.

Karena itu, urai Sekretaris Fraksi PKS ini lebih lanjut, pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pendidikan sekolah seharusnya menjadi fokus pendamping dari fokus utama berupa upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan karakter. Aplikasi sitem pendidikan memang bisa mempermudah siswa, guru dan orangtua mengakses bahan ajar, mencari, menyerap dan bertukar informasi, menyiapkan dan memperoleh evaluasi, melakukan manajemen kegiatan pendidikan bahkan membantu mengatasi kekurangan guru di wilayah-wilayah terpencil. Namun pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional membutuhkan interaksi, pengalaman dan contoh langsung dalam penerapan kesehariannya.

"Pendidikan karakter sangat berhubungan dengan interaksi, pengalaman dan contoh. Karena itu maka peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga pendidikan, penyediaan sarana prasarana sekolah yang cukup dan bermutu serta pengukuhan kurikulum yang mengacu pada perwujudan tujuan pendidikan nasional semestinya harus diutamakan dan dibangun secara komprehensif."

Selain itu Ledia juga mengingatkan betapa rencana pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pendidikan pastilah membutuhkan device, kehadiran internet dan secara mendasar kehadiran pasokan listrik yang stabil. Sehingga kementerian pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif.

"Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari. Darimana anggaran device yang harus disediakan ? Bagaimana dengan ketersediaan dan kualitas layanan internet serta listrik pada setiap wilayah? Bagaimana pula dengan biaya internet dan listrik yang akan timbul di tengah situasi tarif dasar listrik yang semakin hari justru semakin tinggi? Ini semua membutuhkan pertimbangan sangat seksama dari Kemdikbud termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orangtua dan sekolah," tegas Ledia.

Industri Sedang Kritis, PKS Harap Pemerintah Perlu Upaya Ekstra

Fenomena deindustrialisasi dini itu sangat nyata. Deindustrialisasi dini menyebabkan ekonomi nasional tidak dapat mencapai potensi pertumbuhan ekonomi maksimal, penyerapan tenaga kerja hingga pemanfaatan sumberdaya",

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (5/11) --- Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam, meminta pemerintah untuk menggenjot sektor perindustrian.

"Perlambatan kinerja industri pengolahan semakin dalam dan terus bertahan, pemerintah perlu upaya ekstra untuk menjawab tantangan ini." Demikian disampaikan Ecky kepada wartawan di Jakarta, Selasa 5/11/2019.

Ecky menjelaskan berbagai indikator terus mengonfirmasi kondisi tersebut. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia, misalnya, telah menurun sejak lama. PMI mencerminkan keyakinan para manager bisnis di sektor manufaktur. Pada Triwulan I-2019, PMI masih sekitar 50,4; dan menjadi 50,86 pada triwulan II-2019. Sementara itu pada triwulan III-2019, PMI hanya 49,23. PMI Oktober 2019 hanya 47,7.

Sebagaimana diketahui, nilai PMI ditetapkan 50; jika di atas 50 maka sektor manufaktur cenderung berekspnasi; sedangkan di bawah 50 berarti sektor manufaktur berkontraksi.

"Selain PMI, ukuran paling nyata yang dapat menunjukkan penurunan performa industri manufaktur adalah indikator pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Lihat saja, pada 2015, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih sekitar 20%-an; sedangkan pada Triwulan II-2019 hanya 19,5%", imbuh Ecky.

Ecky mengkhawatirkan perlambatan kinerja sektor industri pengolahan, mempercepat deindustrialisasi dini.

"Fenomena deindustrialisasi dini itu sangat nyata. Deindustrialisasi dini menyebabkan ekonomi nasional tidak dapat mencapai potensi pertumbuhan ekonomi maksimal, penyerapan tenaga kerja hingga pemanfaatan sumberdaya", pungkasnya.

Sehingga menurut Ecky, implikasinya sangat signifikan dimana Dampak lain dari deindustrialisasi muncul lewat lonjakan sektor-sektor informal, karena tenaga kerja yang dirumahkan dari sektor industri cenderung meningkat.

"Salah satu pekerjaan yang paling mudah adalah bergerak di sektor informal. Kalaupun mau berwirasausaha, mereka terkendala masalah yang rumit, mulai dari skill hingga permodalan", tutup Ecky.

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, MM - Anggota Komisi XI DPR RI (Foto: dpr.go.id)

PKS Kritisi Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Desa

Jakarta (7/11) --- Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly mengkritisi kinerja pemerintah dalam penyaluran dana desa sehingga terdapat dugaan desa yang tidak berpenduduk namun menerima dana desa.

Padahal dana desa diarahkan untuk berkontribusi besar pada berbagai sisi, terutama pada perbaikan indikator-indikator sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan Fraksi PKS terus mendukung realisasi dana desa.

"Terkait dugaan temuan ini menunjukan bahwa masih ada kelemahan administrasi dalam penyaluranan dana desa, ini penting untuk segera dievaluasi", Ujar Junaidi

Anggota Fraksi PKS dari Dapil Lampung menekankan agar pemerintah jangan terjebak pada evaluasi dan perbaikan penyaluran dana desa, melainkan juga responsivitas solusi harus menjadi perhatian.

Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Keuangan, Anggaran Dana Desa pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 70 triliun dari sebelumnya Rp. 60 triliun. Sedangkan realisasi dana sampai 30 Sepetember 2019 baru mencapai 62,9 % atau 42,2 triliun.

> Pemerintah harus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, kredibel dan efisien
>
> **Ir. H. A. JUNAIDI AULY, MM**
> Anggota Komisi XI DPR RI

"Dugaan ditemukannya desa fiktif untuk mendapatkan dana desa begitu dilematis ketika masih banyak Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal", tutur Bang Jun sapaan akrabnya.

Adanya dugaan desa fiktik semakin menguatkan temuan BPK selama ini bahwa tata kelola dana desa banyak bermasalah. Kedepannya Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki secara serius dan tuntas permasalahan tata kelola dana desa.

"Pemerintah harus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, kredibel dan efisien," tutup Junaidi.

PKS Harap LPS Dapat Antisipasi dan Mitigasi Kemungkinan Gejolak Ekonomi Global

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh LPS adalah seperti kondisi defisit neraca transaksi berjalan, risiko perlambatan pertumbuhan DPK, dan peningkatan credit at risk (kualitas aset) masih tetap perlu diwaspadai

H. HIDAYATULLAH, SE.
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (6/11) --- Anggota Komisi XI DPR RI, Hidayatullah pada Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diselenggarkan Rabu (6/11/2019) berharap, LPS memiliki sensitifitas terhadap gejolak ekonomi global, dan melakukan upaya mitigasi apabila terjadi problem ekonomi nasional, terutama pada tahun 2020.

Melihat ekonomi global dan perdagangan kata Hidayat, akan melanjutkan perlambatannya di tahun 2020 dan diperparah dengan adanya risiko krisis di beberapa negara yang juga telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke lubang resesi. Perekonomian Indonesia juga masih terlalu bergantung pada kondisi global, akibatnya sangat rentan terhadap external shock.

"Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan optimisme yang sering disampaikan Pemerintah" kata Hidayatullah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi dari Dapil Sumatra Utara 1 ini pun meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengantisipasi terdampaknya Indonesia terhadap risiko krisis tersebut.

Menurutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh LPS adalah seperti kondisi defisit neraca transaksi berjalan, risiko perlambatan pertumbuhan DPK, dan peningkatan credit at risk (kualitas aset) masih tetap perlu diwaspadai.

Sebagaimana diketahui bahwa credit at risk (NPL + kredit restrukturisasi) industri perbankan meningkat dari 9,2 persen pada Desember 2018 menjadi 10,5 persen pada September 2019.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai bahwa adanya peluang naiknya peluang tingkat kredit bermasalah. Menurut data LPS, tingkat NPL berada di angka 2,6 - 2,7 persen saat ini, di mana terjadi kenaikan tingkat kredit bermasalah dalam beberapa bulan terakhir.

"LPS harus berperan aktif dalam mengingatkan perbankan untuk lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank juga harus memperhatikan kondisi likuiditas ke depan. Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan", imbuhnya.

Hal lain yang menjadi catatan Hidayatullah bagi LPS berdasarkan (UU PPKSK), LPS mendapatkan mandat baru.

"LPS mendapatkan tugas untuk menambah metode resolusi bank gagal, penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan, dan kewenangan untuk mendapatkan akses dini terhadap bank bermasalah, perlu ditekankan sejauh mana LPS sudah mempersiapkan dan melaksanakan kewenangan-kewenangan baru tersebut." tambah Hidayatullah

Pemerintah Perlu Optimalkan Peran Ekonomi Syari'ah

Layanan dan jasa keuangan syari'ah juga perlu terus dibenahi agar dapat sejajar dengan layanan dan jasa keuangan konvensional. Layanan yang lebih cepat dan memuaskan, akan menarik nasabah untuk memilih jasa keuangan syari'ah, bukan karena faktor emosional akan tetapi karena kualitas

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (7/11) --- Pemerintah perlu lebih serius memberikan perhatian terhadap industri ekonomi syari'ah. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati.

"Dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) yang telah dibentuk oleh pemerintah, seharusnya industri keuangan syari'ah dapat berkembang cepat." Hal ini disampaikan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat Rabu (6/11/2019) di Gedung DPR RI.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja yaitu Kementrian PPN/BAPPENAS tentang evaluasi kinerja BAPPENAS tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020, Anis menyoroti salah satu program nasional BAPPENAS yaitu Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS), dimana BAPPENAS menjadi sekretaris dewan penasehatnya berdasarkan peraturan presiden no. 91 tahun 2016.

KNKS telah melaunching Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia (MEKSI) 2019-2014 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi syari'ah Indonesia dengan merekomendasikan beberapa poin kegiatan diantaranya: penguatan halal value chain, penguatan sektor ekonomi syari'ah, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta penguatan di bidang ekonomi digital perdagangan (e-commerce) dan keuangan (teknologi financial).

Anis menyoroti kenyataan di lapangan dengan menyebutkan data mengenai kondisi industri keuangan syariah di Indonesia yang cenderung masih jalan di

tempat. Data terbaru yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional.

"Dari jumlah tersebut, pangsa pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya atau sebesar 2,75 persen merupakan pangsa pasar non perbankan syariah" jelas Anis.

Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya, permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional. Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional.

"Karena modal kecil otomatis ruang gerak industri keuangan syari'ah menjadi sangat terbatas sehingga sulit bagi industri ini untuk berkembang," tambah Anis

Faktor lain kata Anis, yang menjadikan industri ekonomi syari'ah masih tertinggal adalah unsur layanan dan kecepatan jasa keuangan syariah yang masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuangan konvensional.

"Layanan dan jasa keuangan syari'ah juga perlu terus dibenahi agar dapat sejajar dengan layanan dan jasa keuangan konvensional. Layanan yang lebih cepat dan memuaskan, akan menarik nasabah untuk memilih jasa keuangan syari'ah, bukan karena faktor emosional akan tetapi karena kualitas." tegas Anis.

Hal lain yang menjadi alasan perlunya pemerintah memberikan perhatian terhadap ekonomi syari'ah ungkap Anis, karena ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah telah terbukti sangat diminati oleh dunia perbankan.

"Banyak bank konvensional yang membuka unit syari'ah sebagai salah satu unit usahanya. Demikian juga dengan produk halal bahkan wisata kuliner halal yang merupakan bagian dari industri ekonomi syari'ah mulai berkembang dan memperngaruhi ekonomi nasional", imbuhnya.

Oleh karena itu Anis meminta kementrian PPN/BAPPENAS untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi syari'ah dengan meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi industri yang kuat menopang perkembangan ekonomi nasional.

Fraksi PKS DPR RI

7 Nov pukul 11:57 •

Pemerintah Dzolim Menaikkan Iuran BPJS.
|@kawanustadzansorysiregardprri

#fpksdprri
#berkhidmat
#PKSawasiKabinet

Ahmad Syaikhu Dorong Balai Diklat BPK Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas

Bali memiliki keunggulan sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Pada sisi lain, BPK RI juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI

H. AHMAD SYAIKHU
Wakil Ketua BAKN DPR RI

Jakarta (4/11) --- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa berkualitas.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu dalam kunjungan kerjanya ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. Politisi PKS itu datang ke Pulau Dewata bersama pimpinan dan anggota BAKN lainnya dari Jum'at (1/11/2019) sampai Ahad (3/11/2019).

"Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM Pemeriksa yang berkualitas," kata Syaikhu.

Dalam pandangan Cawagub DKI Jakarta itu, Bali memiliki keunggulan sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Pada sisi lain, BPK RI juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI. Dengan memberikan sentuhan tambahan pada kurikulum yang diperlukan oleh lembaga pemeriksa internasional, maka Balai Diklat BPK bisa membuka kelas-kelas internasional.

"Keunggulan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Balai Diklat BPK," jelas Syaikhu.

Menurut Syaikhu, langkah di atas bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Misal, dengan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Bali. Pendanaan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAID, World Bank, dan sebagainya.

Dengan terobosan seperti ini lanjut Syaikhu, maka penyiapan SDM Pemeriksa yang berkualitas akan semakin cepat, daripada sekadar menunggu turunnya anggaran dari APBN.

"Kita harus melakukan terobosan semacam ini. Jangan sampai hanya menunggu turunnya APBN," tegas Syaikhu.

Balai Diklat BPK RI baru diresmikan Oktober 2019. Keberadaannya diperuntukkan untuk mencetak SDM Pemeriksa dari dalam dan luar negeri.

Saat ini Balai dengan luas 5.000 meter persegi ini baru bisa melayani 40 orang peserta dengan dua ruang kelas dan 23 kamar mess.

H. AHMAD SYAIKHU, Wakil Ketua BAKN DPR RI (tengah) bersama pimpinan dan anggota BAKN lainnya, dalam kunjungan kerjanya ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. (1 - 3 November 2019).

Presiden Minta UU Berkualitas, Tapi Menteri Tidak Serius Bahas. DPR: ini Aneh

logika seleksi dan prioritisasi ini menjadi vital sebagai dasar kerja DPR. Mengingat, dalam prakteknya kapasitas DPR dalam menuntaskan RUU juga terbatas.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Jakarta (5/11) - Presiden Jokowi dalam Sambutannya pada Pembekalan Anggota DPR/DPD di Lemhannas RI menilai bahwa kita sudah kebanyakan UU dan terjadi tumpang-tindih regulasi, sehingga menghambat perizinan usaha. Presiden juga mengusulkan agar indikator kinerja DPR bukanlah sekedar jumlah UU yang dihasilkan, tetapi sejauh mana UU yang disahkan dapat mensejahterakan rakyat. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Presiden pada saat pidato awal pelantikannya akhir oktober lalu.

Harusnya Presiden tidak perlu risau dengan jumlah UU yang banyak, sepanjang seluruhnya dibahas dengan proses yang benar dan efisien untuk kesejahteran rakyat. Investor itu butuh kepastian, salah satunya karena UU yang berkualitas dan tidak berubah-rubah.

Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI menilai UU berkualitas akan hadir sepanjang Pemerintah serius dalam pembahasan bersama DPR. "Itu ide yang baik. Kita harus mendahulukan kualitas ketimbang kuantitas, apalagi DPR sedang menyusun Prolegnas jangka menengah 2020-2024. Wujud nyata dari keseriusan itu harusnya Presiden serius mendorong para Menteri di sesi pembahasan." tambahnya.

Mulyanto menambahkan, sering disalahpahami oleh Publik bahwa UU sepenuhnya dibuat DPR (parliament heavy), padahal dalam prosesnya menurut konstitusi negara kita dibahas dan disepakati bersama Pemerintah.

DPR sejatinya memang bekerja dengan basis berpikir seleksi dan prioritas. Namun demikian pembahasan sebuah UU seringkali mandek, karena Pemerintah dalam panitia kerja (panja) tidak hadir atau responnya lambat dalam menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Ada dua jalur masuk usul inisiatif RUU, yakni dari DPR dan Pemerintah. Kemudian berbagai ide tentang substansi UU dijaring untuk selanjutnya disaring, baik RUU yang datang dari aspirasi masyarakat melalui inisiatif DPR ataupun melalui usul Pemerintah. Dari proses seleksi tersebut tentu jumlah usulan RUU muncul

Menurut Mulyanto, untuk itu selain DPR, maka Pemerintah juga perlu selektif dalam pengusulan RUU. Jangan, regulasi yang cukup sebagai Peraturan Pemerintah dipaksakan menjadi UU. Arogansi sektoral perlu terus dikurangi, agar Kementerian tidak terlalu "bersemangat" untuk menguatkan kelembagaan dirinya melalui regulasi apalagi melalui UU.

"Lalu, hasil saringan atas RUU yang masuk di atas, dilakukan prioritisasi dalam Prolegnas (program legislasi nasional), baik dalam bingkai jangka menengah 5 tahunan, atau jangka pendek, prioritas tahunan" tambah Mulyanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sesmen Kemenristek.

Menurut Mulyanto, logika seleksi dan prioritisasi ini menjadi vital sebagai dasar kerja DPR. Mengingat, dalam prakteknya kapasitas DPR dalam menuntaskan RUU juga terbatas.

"Jadi sebenarnya tugas menuntaskan UU ini adalah tanggung-jawab bersama DPR dan Presiden, bukan hanya tugas lembaga legislatif ini", pungkasnya.

"Data pengalaman tahun 2014-2019 memperlihatkan, bahwa rata-rata UU yang mampu disahkan DPR sekitar 7 UU/tahun. Dalam 5 tahun DPR hanya mampu menyelesaikan 37 UU. Sementara jumlah RUU dalam Prolegnas jangka menengah terdapat sebanyak 189 RUU", tambahnya.#

Dr. H. MULYANTO, M.Eng Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

HARI ASPIRASI

Kunjungan SDIT Hasanah Quranic School

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kota Bekasi Hj. Nur Azizah Tamhid, BA. MA menerima kunjungan dari STIU Dirasah Islamiyah Siswa-siswi SDIT Hasanah Quranic School, Kota Bekasi pada Selasa 05 November 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

Foto : Ardian/ Humas FPKS

Kasus WNI meninggal saat antri Paspor harus dijadikan momentum untuk evaluasi dan perbaikan. Walaupun penyebabnya karena serangan jantung, namun kenyamanan pelayanan KBRI Kuala Lumpur harus bisa ditingkatkan

Dr. HM. HIDAYAT NURWAHID, MA

HNW Prihatin: WNI Meninggal Saat Antri Urus Paspor di KBRI KL

Proses pengurusan paspor yang tidak ramah, akhirnya menelan korban. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang juga Anggota DPR Dapil DKI 2 mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita atas meninggalnya Tamam bin Arsyad (55 tahun) WNI yang meninggal dunia saat antri Paspor di KBRI Kuala Lumpur pada 31 Oktober 2019.

HNW prihatin atas kejadian tersebut. "Kasus WNI meninggal saat antri Paspor harus dijadikan momentum untuk evaluasi dan perbaikan. Walaupun penyebabnya karena serangan jantung, namun kenyamanan pelayanan KBRI Kuala Lumpur harus bisa ditingkatkan," ujar Hidayat.

Fenomena pekerja migran yang antri panjang bahkan harus menginap karena mereka datang dari daerah yang jauh juga terjadi di negara lain seperti di Arab Saudi atau Taiwan. Pada era digital harusnya semua bisa dilayani lebih mudah dan cepat, permasalahan urusan dokumen kewarganegaraan di kantor perwakilan RI di luar negeri harus bisa menjawab tantangan.

"Sehebat apapun sistem yang dibuat namun kurang tersosialisasi dengan baik sama saja hasilnya, harus ada upaya yang lebih masif mengenalkan sistem online. Setiap WNI perlu diedukasi dan dilayani karena tugas negara menlindungi dan mencerdaskan rakyat," jelas Hidayat.

Untuk Malaysia, dengan jumlah WNI lebih dari 1 juta orang memerlukan pelayanan prima, Kementerian luar negeri sebaiknya memperluas akses pelayanan dengan membuka kantor konsul di beberapa negara bagian dimana banyak pekerja migran yang memperlukan perlindungan

KBRI juga sebaiknya memberikan jalur khusus untuk mereka yang sudah termasuk warga senior (60 tahun ke atas) termasuk perempuan dan ibu hamil.

Ini merupakan fenomena gunung es dalam pelayanan WNI di luar negeri. Semoga kedepan pemerintah bisa memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi WNI di luar negeri

Khusus untuk KBRI Kuala lumpur keterbatasan ruangan dan kenyamanan ruang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sejak lama kasus-kasus pelayanan bermasalah terus terjadi, inovasi yang dilakukan harus diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang terus menerus agar inovasi dapat membuahkan hasil maksimal

Permasalahan WNI menunggu antr paspor di KBRI Kuala Lumpur bukanlah masalah baru, sudah terjadi sejak lama, dan memang memperburuk citra bangsa karena keduataan tidak mampu menyediakan ruang tunggu yang nyaman, sehingga mereka harus memadati jalanan dan trotoar dan menimbulkan kemacetan akibat tidak berdayanya pemerintah kita menyediakan ruangan yang layak.

Bila ingin mengambil paspor sejak siang saudara kita pahlawan devisa sudah harus mengambil antrian dan menunggu hingga larut malam untuk dapat nomor dan menunggu proses keesokan harinya.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Luar Negeri Dr. HM. Hidayat Nurwahid, MA (Foto : Pato)

Mereka banyak yang datang dari berbagai negara bagian dan ladang/tempat kerja yang jauh dan terpaksa menunggu di emperan dan trotoar. Bisa dibayangkan sisa tenaga mereka sepulang kerja, kelelahan, ketidaknyamanan mengakibatkan mereka mudah terkena penyakit.

"Kasus saudara kita almarhum pak Tamam harus jadi momentum dan bahan evaluasi perbaikan ke depan oleh Kemenlu, imigrasi dan KBRI KL. Bagaimanya mestinya mekanisme antrian paspor harus dibangun secara lebih manusiawi," simpul Hidayat. Anggaran Kemlu sangat besar untuk melayani dan melindungi WNI, sementara pahlawan devisa juga memberikan kontribusi remitensi yang besar kepada negara.

Legislator Sumbar Apresiasi Penetapan Ruhana Kuddus Jadi Pahlawan Nasional

"Saya sangat bangga, dan gembira, kini pemerintah telah mengakui sesosok perempuan sumbar, yang memiliki peran besar terhadap keterbukaan informasi dan kemajuan di bidang pendidikan

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi DPR RI Dapil Sumbar

Jakarta (08/11) --- Anggota DPR RI, Nevi Zuairina mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan sosok inspiratif, jurnalis perempuan asal Sumatera Barat sebagai Pahlawan Nasional. Sosok yang dimaksud adalah Ruhana Kuddus, atau Ruhana Kuddus, jurnalis perempuan pertama asal Sumatera Barat yang pada tahun ini telah di sematkan oleh presiden RI sebagai pahlawan nasional.

"Saya sangat bangga, dan gembira, kini pemerintah telah mengakui sesosok perempuan sumbar, yang memiliki peran besar terhadap keterbukaan informasi dan kemajuan di bidang pendidikan. Beliau, almarhumah Ruhana Kuddus, telah kami ajukan bersama-sama masyarakat sumatera barat sejak bulan Maret 2017 sampai September 2017. Alhamdulillah setelah dua tahun pengajuan, kini pemerintah telah menetapkan jurnalis pertama perempuan Indonesia yang berasal dari Sumbar sebagai Pahlawan Nasional", jelas Nevi.

Legislator Sumatera Barat ini menambahkan, Ruhana Kuddus hidup se-zaman dengan pahlawan nasional peremuan kita, Kartini. Ruhana Kuddus lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam 20 Desember 1884. Surat Kabar yang didirikannya yang bernama Soenting Melajoe merupakan inisiatif akibat surat kabar perempuan, Poetri Hindia tempat beliau menulis di bredel oleh pemerintah Belanda. Dan akhirnya beliau wafat di Jakarta pada 17 Agustus 1972 pada usia 87 tahun.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa anak-anak muda sekarang patut meneladani dan mengambil

Ruhana Kuddus

hikmah dari perjuangan sosok dan inspirasi Ruhana Kuddus. Menulis, membaca, berbahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa latin, arab-melayu ia kuasai ketika usia belia dimana ketika itu pendidikan tinggi bagi perempuan sangat terlarang. Perjuangannya merupakan sebuah kekuatan jiwa dengan semangat memberi, bukan semangat mengambil.

Ruhana Kuddus, lanjut nevi, bukan saja sekedar pahlawan dibelakang meja. Ia turut sumbangsih mendirikan dapur umum bagi para pejuang. Beliau sebagai pencetus ide pergerakan antar kota pada perangkat atau alat perang bagi pejuang yang disembunyikan dia antara sayur mayur. Beliau bukan sekedar pahlawan akibat sebuah tulisan, tapi beliau adalah pahlawan yang turun langsung ke lapangan dengan segala kemampuannya.

"Saya berharap, moment yang sangat bagus di hari pahlawan tahun ini, para pemuda Indonesia dapat mencontoh sosok Ruhana Kuddus untuk bertekad memberikan karya terbaik untuk negeri. Saya berterima kasih, kepada pemerintah pusat, yang telah menyematkan sosok pahlawan kami asal Sumatera Barat sebagai pahlawan Nasional.

Semoga kedepannya, akan muncul pahlawan-pahlawan baru dari anak bangsa, yang memberikan sumbangsih bagi negara di tempat ia berada, pada waktu ia menjalankan kehidupannya", tutup Nevi Zuairina.

Foto :
Antara

LAUNCHING RUMAH KOMUNIKASI INFORMASI

Alifudin Siap Tampung Aspirasi Masyarakat

Anggota DPR RI Fraksi PKS H. Alifudin melaunching Rumah Komunikasi Informasi H. Alifudin yang berlokasi di Jalan H. Rais A. Rachman Gang Bukit Tinggi No.57 Kota Pontianak, Sabtu (2/11/2019) malam.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW PKS yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalbar Arif Joni Prasetyo serta Anggota DPRD Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PKS.

Anggota DPR RI H. Alifudin mengatakan, rumah komunikasi informasi ini diharapkan menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui apa yang tengah dikerjakan wakilnya baik di DPRD provinsi, kabupaten dan kota hingga di DPR RI.

"Kami di DPR wajib memberi informasi dan komunikasi. Warga bertanya, maka kami harus bisa menjawab. Harapan kami memiliki rumah informasi komunikasi ini, agara warga lebih nyaman. Insya Allah kedepan, kita siapkan rumah yang lebih besar lagi," kata Alifudin yang akan bertugas di Komisi IX DPR RI itu.

> Harapan kami memiliki rumah informasi komunikasi ini, agara warga lebih nyaman. Insya Allah kedepan, kita siapkan rumah yang lebih besar lagi,"
>
> **H. ALIFUDIN, SE, MM**

Alifudin menerangkan, bagi warga yang datang ke rumah informasi dan komunikasi itu akan diterima oleh staf yang sudah diberi tugas. Mereka nantinya akan mencatat dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Silahkan warga salurkan aspirasi kepada staf kami. Ada staf resmi ada SKnya. Aspirasi akan dicatat. Tugas saya di komisi sembilan, meliputi masalah kesehatan, tenaga kerja dan jaminan sosial. Tapi jika ada masukan atau aspirasi di luar bidang itu, kami tetap akan mencatatnya menindaklanjuti juga," ujar Alifudin.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Kalbar Arif Joni Prasetyo memgingatkan kader yang terpilih menjadi anggota dewan, serius bekerja. Arif juga menyatakan jika legislator dari PKS wajib untuk berinteraksi dengan masyarakat yang diwakilinya.

"Wakil rakyat harus dekat dengan rakyatnya, salah satu titik temu di rumah informasi dan komunikasi. Jangan menjauh dengan rakyat yang kita wakili. Jangan matikan HP. Jangan ada telepon, SMS atau WA tidak dijawab. Karena ini, merupakan karakter wakil rakyt dari PKS. Sebab kalo kita jauh dari yang diwakili, untuk apa kita ada di DPRD ," tegasnya.

Arif Joni juga memastikan jika rumah informasi komunikasi H. Alifudin benar-benar dimanfaatkan dan staf yang bertugas harus bertanggung-jawab, sehingga warga yang datang tidak kecewa.

"Karena itu saya berharap rumah ini jadi rumah bersama. Ini merupakan pintu gerbang untuk terus menjalin

WNI MENINGGAL DI MALAYSIA

Pelayanan Bermasalah, KBRI Harus Berbenah

inovasi layanan harus segera dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Manfaatnya untuk staf di KBRI yang melayani maupun WNI sebagai penerima manfaat layanan tersebut.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Jakarta (2/10) --- Anggota Komisi IX DPR yang membawahi bidang ketenagakerjaan Kurniasih Mufidayati, menyayangkan kejadian meninggalnya WNI saat mengantri pengurusan paspor di KBRI Malaysia.

Menurutnya, Pengurusan paspor yang bermasalah bukan persoalan baru. Paspor sebagai identitas warga negara di luar negeri memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu sudah selayaknya pihak-pihak terkait bekerja serius dalam pengelolaanya sehingga warga negara kita yang sedang berada di luar negeri mendapatkan pelayanan terbaik.

"Insiden meninggalnya warga negara kita di Malaysia dalam pengurusan paspor sebagai akibat antrean pajang adalah kejadian memalukan dan pukulan telak bagi wibawa negara kita, di hadapan negara lain terutama Malaysia." ungkapnya.

Kejadian semacam Lanjut Kurniasih tidak semestinya terjadi jika aparat birokrasi dan pihak terkait berbenah diri dan memperbaiki polapikir mereka dalam menjalankan tugasnya.

"Masyarakat harus dilayani dengan sebaik mungkin bukan malah menyusahkan dan merepotkan dengan alur birokrasi yang berbelit-belit dan melelahkan" lanjutnya.

KBRI Malaysia kata Kurniasih, diharapkan bisa melakukan inovasi pelayanan paspor dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Apalagi WNI di Malaysia merupakan yang terbanyak jumlahnya.

"Bayangkan saja, antrian bisa sampai ratusan nomor per harinya. Jumlah loket terbatas dan dibuka untuk pengambilan nomor antrean jam 12 malam, disaat orang beristirahat. saudara-saudara kita para pekerja migran yang mau urus paspor harus berjam-jam antri sampai mendapat pelayanan. Ini melelahkan dan tidak efektif" cerita Mufidayati.

Mufidayati yang juga berasal dari Dapil DKI 2 termasuk Luar Negeri menyatakan, inovasi layanan harus segera dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Manfaatnya untuk staf di KBRI yang melayani maupun WNI sebagai penerima manfaat layanan tersebut.

"Pelayanan online yang sudah dilakukan belum efektif berjalan karena biasanya yang daftar akan dapat jadwal pengurusan sampai sebulan. Sementara kebutuhan masyarakat harus cepat" terangnya.

Oleh sebab itu, Kurniasih menegaskan persoalan pelayanan paspor di KBRI Malaysia ini sudah lama dikeluhkan WNI di sana. Ia mendorong KBRI Malaysia segera memperbaiki sistem pelayanan paspor yang lebih cepat dan manusiawi sehingga ke depan tidak ada lagi keluhan layanan yang bertele-tele, antrian panjang dan sampai jatuh korban jiwa.

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si

PROFIL **Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Pendidikan Keluarga Nomer Satu

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten II yang melingkupi Kab. Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Selama tiga periode di DPR malang melintang di Komisi II, Komisi VIII, Komisi III, hingga Komisi I.

Jazuli memiliki 4 anak, 3 putra dan satu putri. Sosok panutan yang humoris dan pantang menyerah. Keluarga baginya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses menghadirkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Doktor bidang Sumber Daya Manusia (SDM) ini rutin membangun komunikasi dengan putra putrinya. Bukan sekedar untuk mengetahui perkembangan mereka, tapi berikhtiar memastikan sosok Ayah hadir dalam kehidupan mereka.

Dengan kesibukan yang luar biasa sebagai anggota dewan dan Ketua Fraksi PKS, Jazuli menanamkan kesadaran bahwa dirinya bukan saja milik keluarga saat ini tapi milik umat dan rakyat. Dengan demikian keluarganya paham sebagai pribadi harus menebar manfaat bagi orang banyak.

Meski demikian selalu ada waktu bersama keluarga, bukan soal intensitas tapi kualitas. Biasanya saat sarapan atau sholat berjamaah dilanjutkan tilawah bersama, saat itu Jazuli mengupdate perkembangan dan cerita dari istri dan anak-anak.

Ada juga momen liburan bersama keluarga (biasanya di akhir tahun) untuk membangun dan mengokohkan resolusi keluarga.

Jazuli percaya ketahanan keluarga adalah solusi perlbagai permasalahan sosial serta menghadirkan ketahanan bangsa (karena itu pula, Fraksi PKS berinisiatif mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga di DPR).

> Di tengah kesibukan kita, tetap harus ada waktu untuk pendidikan keluarga

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

Website
fraksi.pks.id

Instagram
fraksipksdprri

Twitter
@fraksipksdprri

Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id

Touchdown!! 10.000 follower
IG Fraksi PKS DPR RI

Yuk ikuti Challenge Dubber Video Anshory Siregar Tolak Naik BPJS

Yang beruntung mendapat Give Away menarik
dan Tanda Tangan dari Ust. Anshory

Follow
Fraksipksdprri